

**MEMELAYUKAN PATANI KEMBALI: KONFLIK DAN  
GERAKAN ETNISITAS PATANI  
DI THAILAND SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**RAUDHATUR RAHMAH**

NIM. 150305078

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
1441 H/2020 M**

**MEMELAYUKAN PATANI KEMBALI: KONFLIK  
DAN GERAKAN ETNISITAS DI PATANI DI  
THAILAND SELATAN**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar- Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
(S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

**RAUDHATUR RAHMAH**

NIM. 150305078

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

A-W



Muhasamad Sahlan, M.Si  
NIP.19710242006041003

Pembimbing II,



Ariansyah, M,A  
NIP.198104222006041004

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar- Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Sosiologi Agama

Pada hari / Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020 M  
27 Jumadil Awa 1441H

Di Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

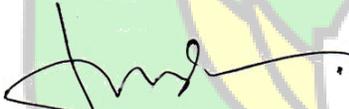
Ketua,

  
Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Si  
NIP.197905082006041001

Sekretaris,

  
Arfiansyah, M.A  
NIP.198104222006041004

Anggota I,

  
Juanda Djamal

Anggota II

  
Fatimah Syam  
NIDN. 0113127201

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
M. Hum  
NIP.196502041995031092

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raudhatur Rahmah  
NIM : 150305078  
Jurusan : Sosiologi Agama  
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Menyatakan bahwa skripsi ini berjudul “Memelayukan Patani Kembali: Konflik dan Gerakan Etnisitas di Patani, Thailand Selatan”. Adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 5 November 2019

Yang menyatakan,



  
Raudhatur Rahmah  
NIM. 150305078

## ABSTRAK

Judul/ NIM : Raudhatur Rahmah/ 150305078  
Judul Skripsi : Memelayukan Patani Kembali: Konflik dan Gerakan Etnisitas di Patani, Thailand Selatan  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Prodi : Sosiologi Agama  
Pembimbing I : Muhammad Sahlan, M. Si  
Pembimbing II : Arfiansyah, M.A

Konflik Patani semakin bertambah ketika pemerintah Siam berupaya menghilangkan identitas budaya dan agama masyarakat Muslim Melayu. Upaya perdamaian yang dilaksanakan berhasil dilakukan antara pemerintah Siam dengan Gerakan Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) sejarah terjadinya konflik antara muslim Melayu Patani dengan pemerintah Siam, (2) upaya kontestasi dan negosiasi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik identitas Muslim melayu Patani di Thailand Selatan, (3) Upaya dan proses reinternalisasi identitas Muslim Melayu Patani di Thailand Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan Teknik studi lapangan. Lokasi penelitian di provinsi Narathiwat Ampoen Bacho di mukim Barittai. Sumber data penelitian adalah tokoh masyarakat dan pemerintahan serta warga di Narathiwat. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian: (1) konflik antara muslim Melayu Patani dengan pemerintah Siam dimulai sejak perjanjian Anglo-Siam, konflik dipicu oleh perbedaan budaya dan agama antara muslim Melayu dengan pemerintah Siam, (2) Upaya kontestasi dan negosiasi dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik identitas Muslim melayu patani dengan cara melakukan dialog yang difasilitasi oleh lembaga OKI dan PBB. (3) Proses reinternalisasi identitas Muslim Melayu Patani dilakukan dengan pemberian izin untuk menggunakan kembali Bahasa Rumi (Melayu), mendatangkan lembaga dari luar seperti ACSTF yang memiliki karakter, sifat dan budaya yang sama dengan masyarakat Patani.

Kata kunci: Konflik, Gerakan Etnisitas, Thailand Selatan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena berkat rahmat-Nya skripsi ini bisa selesai. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua dan para guru penulis yang telah mengajarkan banyak hal penting dengan penuh cinta. Skripsi ini juga penulis persembahkan bagi para pembaca sebagai bagian dari konsentrasi penulis terhadap isu minoritas yang selama ini penulis geluti. Alhamdulillah selama masa perkuliahan sarjana ini, tepatnya pada semester VII, penulis memperoleh kesempatan menjadi relawan pendidikan atau *volunteer of education* di Thailand Selatan sambil melakukan riset lapangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih ke pada banyak pihak yang telah mendukung penulis selama ini. Teristimewa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, ayah, ibu, paman, bibi, dan nenek. Terima kasih banyak atas doa-doa yang telah dipanjatkan untuk penulis selama ini. Terima kasih kepada ACSTF dan SLC yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjadi bagian dari kegiatan di Patani sehingga memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Djuanda Jamal, ST. dan Baihaqi, M.Si, yang banyak berjasa dalam mewujudkan mimpi penulis melihat langsung kondisi dan situasi yang ada di Thailand Selatan.

Selanjutnya, terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar atas selesainya skripsi ini. Mereka adalah segenap pengelola Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, di antaranya yaitu Prof. Dr. H. Warul Walidin, MA, Drs. Fuadi, M.Hum, Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen selaku pembimbing skripsi yang banyak berjasa, yakni Muhammad Sahlan, M.Si dan Arfriansyah, M.A, yang bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing penulis.

Terima kasih banyak kepada orang tua angkat penulis yang ada di Thailand Selatan, Abah, Umi, dan Qasim Daud Fathani yang selama ini telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi. Penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dan pelayanan yang telah diberikan pada penulis selama di sana termasuk untuk keamanan diri penulis. Semoga apa yang dicita-citakan untuk bangsa Patani akan Allah swt. wujudkan.

Terima kasih juga untuk para sahabat seperjuangan, Nurkhizzaty, S.Pd, Nadhirah, Febri Ramadani, Mhod. Asharaf, S.Ag, Mhod Dan, S.Pd, Latifa Hanum, A.Md dan rekan sejawat di UIN Ar-Raniry angkatan 2015. Terima kasih banyak atas dukungan yang telah kalian berikan kepada Penulis selama ini sehingga semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula terima kasih untuk para sahabat dari Thailand, Sobree, S.Pd. Amri Waji, Batlan Wani, dan Mudasir,S.H.Int yang telah membantu untuk mendapatkan data-data yang penulis tuangkan dalam karya ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dengan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki, tentu banyak kelemahan dan juga kekurangan yang akan ditemui di dalam skripsi ini. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak.

Banda Aceh, 5 November 2019

Penulis,

Raudhatur Rahmah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>5</b>
A. Kajian Pustaka.....	5
B. Kerangka Teori .....	7
C. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
A. Lokasi Penelitian.....	13
B. Jenis Penelitian .....	13
C. Sumber Data .....	13
D. Teknik Pengumpulan Data.....	14
E. Teknik Analisa Data .....	16
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	17
B. Agama Dan Budaya Masyarakat Patani .....	17
1. Karakter Masyarakat Melayu Patani .....	17
2. Budaya Masyarakat Melayu Patani.....	18
3. Kenduri yang berkaitan dengan Hari Hari Besar Agama .....	18

4. Kenduri Yang Berkaitan Dengan Kehidupan....	19
5. Bahasa dan Budaya Patani .....	19
C. Perkebang Islam di Patani.....	21
1. Tok Pasai .....	22
2. Wardi Husein.....	22
D. Awal Mula Terjadi Konflik Di Patani .....	23
1. Kebijakan Thesaphiban .....	24
2. Kebijakan Darurat Militer .....	25
E. Gerakan Etnisitas Melayu Di Patani .....	26
F. Tahapan Perkembangan Gerakan Etnisitas Melayu Patani .....	29
1. Gerakan Etnisitas Kemelayuan Patani Awal (1947-1948).....	30
2. BRN ( <i>Liberation Front of Republic Patani</i> ).....	30
3. PULO ( <i>United Liberation Organization</i> ).....	32
4. BNPP ( <i>National Liberation Front Of Patani</i> )...	32
G. Reinternalisasi Perkembangan Gerakan Etnisitas Melayu Di Patani .....	33
1. Surau (Masjid).....	34
2. Pondok (Pesantren) .....	35
3. Tadika (Taman Pendidikan Kanak-kanak) .....	35
H. Gerakan Reinternalisasi secara Internasional .....	37
1. Lembaga ACSTF ( <i>Acehnes Civil of Society         Talk Foces</i> ) .....	37
I. Negosiasi dan Kontestasi Patani.....	38
1. Otonami Hukum Islam.....	39
2. Kaum Ulama Patani .....	40
J. Upaya Rekonsiliasi Di Patani .....	45
1. Membuka Dialog Dengan Thailand (2005) .....	45
2. Membuka Dialog Dengan Gerakan Etnisitas Kemelayuan Patani (2009).....	48
3. Membuka Dialog Dengan Civil Society di PBB (2019) .....	49

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Komunitas Melayu yang berdomisili di bagian selatan Thailand dikenal dengan sebutan muslim Patani. Patani adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh Raja Phya Tu Nakpha. Sebelumnya kerajaan ini bernama Langkasuka. Pada awalnya Langkasuka adalah kerajaan Hindu, namun pada masa kejayaan Sriwijaya wilayah ini berubah coraknya menjadi Buddha. Kerajaan Patani atau Kesultanan Patani Darussalam merupakan kerajaan Islam yang terbentuk pada abad ke 15 Masehi.<sup>1</sup> Setelah masuk agama Islam pada abad ke-15, Raja Phya Tu Nakpha bergelar Sultan Ismail Syah Zilullah Din Alam. Gelar ini diberikan oleh seorang ulama yang berasal dari Pasai, Aceh. Patani pernah berjaya di bawah kepemimpinan tiga orang ratu yaitu ratu hijau (1584-1616 M), ratu biru (1616-1624 M) dan ratu ungu (1624-1635 M). Pada masa pemerintahan ratu kuning (1635-1651 M), kerajaan Patani mengalami kemunduran. Sehingga pada tahun 1785 M ditaklukan oleh kerajaan Siam.

Pada 10 Maret 1909, muncul perjanjian (*Anglo-Siamese*) antara kolonial Inggris dengan kerajaan Siam.<sup>2</sup> Perjanjian itu menyepakati pembagian wilayah kekuasaan dan politik. Wilayah Melayu Patani dan daerah Melayu lainnya jatuh ke kepihak Siam (Thailand). Semenjak itu, Kerajaan Patani berakhir dan penduduk Melayu mengalami invasi dan hegemoni Siam dalam hal politik, budaya dan agama.

Ketegangan terjadi semenjak pemerintah Siam menerapkan kebijakan revolusi budaya (*Rathayiom*) dengan tujuan mengsiamkan orang-orang yang bukan bangsa Thailand

---

<sup>1</sup> Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerjaan Melayu Patani*, Cet 2 (Selangor: Universiti Antar Kebangsaan Malaysia, 2005), Hlm 249.

<sup>2</sup> Mohd Zamberi A. Malek, *Harimau Malaya: Biografi Tengku Mahmood Mahyiddeen* (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia , 1999), Hlm 35.

(*Siamization policy*) seperti orang-orang Melayu dan Cina.<sup>3</sup> misalnya, sejak tahun 1921, pemerintahan Siam mewajibkan sekolah-sekolah mengajarkan bahasa Siam sebagai bahasa pengetahuan dalam pendidikan. Kebijakan ini mengakibatkan bahasa Melayu tidak berkembang.

Pemerintahan Siam juga mengintervensi budaya dan agama dengan menghantarkan patung-patung berhala ke sekolah-sekolah. Mereka juga memaksa orang-orang Melayu mengantikan nama mereka dengan nama Siam.<sup>4</sup> Konflik Patani semakin bertambah ketika pemerintahan Siam berupaya menghilangkan identitas budaya dan agama dengan cara memaksa kegiatan pembelajaran agama Buddha bagi masyarakat muslim Melayu. Selain itu masyarakat Melayu yang berumur 21 tahun juga diambil sebagai tentara kerajaan Siam.

Hal inilah yang menjadi permasalahan besar bagi muslim Melayu di Thailand Selatan tersebut. Kegiatan keagamaan bagi minoritas muslim Melayu dihalang-halangi oleh pemerintahan Siam. Guru-guru muslim didatangi untuk melihat apa yang diajarkan kepada masyarakat Melayu. Tidak jarang para guru tersebut ditangkap secara paksa.

Masyarakat Melayu Patani mulai melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Siam pada masa kepemimpinan perdana menteri Thailand yang bernama Luang Pipul Songkram pada tahun (1934-1944). Hal ini dikarenakan pemerintahan Siam membatalkan undang-undang yang dulu dipakai oleh kerajaan Siam, sebelum Patani dibagi menjadi 3 wilayah yaitu: Patani, Yala dan Narathiwat.

Tokoh Melayu Patani yang dikenal dalam melakukan perlawanan ini bernama Haji Sulung. Kedudukan masyarakat Melayu semakin tertantang dengan identitas budaya dan keagamaan Siam. Pada tahun 1944, seluruh ulama dan guru-guru melakukan pertemuan mendirikan sebuah lembaga yang bernama

---

<sup>3</sup> Muhammad Kamal K.Zaman, "13 Ogos" (Unpublished, 1996).Hlm 13.

<sup>4</sup> K.Zaman, "13 Ogos" Hlm 13.

Majelis *Hayatul Al-Muffizul Al-Ihkamul Syarieyah*, yang tujuannya untuk mengembalikan identitas Melayu.<sup>5</sup>

Invasi budaya yang dilakukan pemerintah Siam terhadap muslim Melayu Patani semakin memperuncing keadaan. Perundingan yang diupayakan untuk menciptakan perdamaian tidak berhasil dilakukan oleh pemerintah Siam. Sehingga mulailah muncul gerakan untuk mengembalikan identitas budaya muslim Melayu. Upaya tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan sosial kebudayaan. Pada akhirnya terjadi perjanjian damai antara pihak kerajaan Siam dengan gerakan Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tahun 2013.<sup>6</sup>

Perjanjian damai tersebut menghentikan konflik yang berkepanjangan. Masyarakat Patani mencoba mengembalikan etnisitasnya sebagai muslim Melayu. Berbagai upaya dilakukan dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan dengan melibatkan tokoh-tokoh tua dan muda. Berdasarkan latar belakang masalah inilah, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Memelayukan Melayu Kembali: Konflik dan Gerakan Etnisitas di Patani, Thailand Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah terjadinya konflik antara muslim Melayu Patani dengan pemerintah Siam?
2. Bagaimanakah upaya dan proses reinternalisasi identitas muslim Melayu Patani di Thailand Selatan?
3. Bagaimanakah kontestasi dan negosiasi penyelesaian konflik identitas muslim Melayu Patani di Thailand Selatan?

---

<sup>5</sup> K.Zaman. “13 Ogos”Hlm 13

<sup>6</sup>BBC News Indonesia, “Thailand menyepakati perdamaian dengan pemberontak,”Diakses tanggal 13Februari2019(online).[https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/28/130228\\_thailand\\_militan](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/28/130228_thailand_militan).

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejarah terjadinya konflik antara muslim Melayu Patani dengan pemerintah Siam.
2. Mengetahui upaya dan proses reinternalisasi identitas Muslim Melayu Patani di Thailand Selatan.
3. Mengetahui upaya kontestasi dan negosiasi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik identitas muslim Melayu Patani di Thailand Selatan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat kepada aspek sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini untuk inspirasi karya ilmiah selanjutnya sebagai khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi yang berhubungan dengan konsep kontestasi, negosiasi dan resolusi di Thailand Selatan dalam penyelesaian konflik pada suatu komunitas sosial.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada Masyarakat Melayu di Thailand Selatan dan memberikan pembelajaran bagi wilayah lain yang mengami konflik terutama dengan latar belakang budaya dan agama yang sama, tentang upaya yang dapat dilakukan untuk reinternalisasi identitas pada masyarakat muslim Melayu di Thailand Selatan. Bukan hanya masukan pada masyarakat Thailand Selatan.

## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

### A. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian berdasarkan yang sama dengan judul di atas. Namun demikian, banyak terdapat referensi dari karya tulis dalam bentuk artikel dan buku yang membahas masalah konflik di Thailand Selatan.

Maszlee Malik, dengan judul bukunya “*Jalan Panjang Menuju Damai di Patani*”. Buku ini menjelaskan bentuk-bentuk kronologi perjuangan muslim di Patani Darussalam. Terutama pada tragedi mesjid Kerisik, Tak Bai, Mesjid Air Payang, peristiwa penembakan, pegeboman, pembunuhan dan tindakan-tindakan yang bersifat diskriminasi kepada kaum minoritas yang terus berlangsung sampai sekarang ini.<sup>7</sup>

Karya selanjutnya yang ditulis oleh Ahmad Suaedy, bukunya yang berjudul “*Dinamika Minoritas Muslim Mencari Mencari Jalan Damai*”. buku ini mengurai peran organisasi-organisasi *civil society* Muslim dalam proses pencarian jalan damai di wilayah minoritas Muslim Patani, Thailand Selatan dan bangsa Moro di Filipina Selatan. Penguatan peran *civil society* muslim dalam resolusi konflik itu berjalan seiring dengan proses globalisasi yang menunjukkan fenomena yang paradoks. Di satu pihak makin kuatnya pengaruh global atas masalah lokal. Namun di lain pihak menguatnya kembali identitas lokal, baik berupa mobilisasi identitas, etnis, agama dan simbol tradisi lokal yang saling menguatkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Maszlee Malik, *Jalan Damai Menuju Damai Di Patani Kronologi Perjuangan Muslim Di Patani Darussalam* (Pulau Pinang: Aman Patani, 2012).

<sup>8</sup> Suaedy Ahmad, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai*” *Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*, Center for Islam and Southeast Asia Studies The WAHID Institute (CISEAS-WI) (Jakarta: Puslitbtur dan Khazanah Keagamaan badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan CISEAS-THE WAHID Institute, 2012).

Nik Anuar Nik Mahmud, bukunya yang berjudul “*Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*”. Buku ini menjelaskan masa penghapusan pemerintahan Melayu. Pada tahun 1902 dan asimilasi kebudayaan atas dasar (*Rathaniyom*). Dan melahirkan tokoh-tokoh perjuangan seperti Teungku Mahmood Kadir Kamaruddin, Teungku Ahdul Jalal, Teungku Mahmood Mahyidden dan Haji Sulung.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yurisa Irwan tentang “Strategi Resolusi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Konflik Thailand Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2004, terjadi konflik kekerasan di Thailand Selatan antara pemerintah Thailand dengan kelompok pemberontak yang mewakili masyarakat Muslim Melayu Patani. Diskriminasi terhadap budaya, berupa bahasa dan agama, masyarakat Patani menjadi penyebab konflik. Kondisi ini mengundang perhatian Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk terlibat dalam penyelesaian masalah sebagai pihak ketiga.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan Wan Yunil Amri Bin Wan Yunil Khairi tentang “*Jatuhnya Kerajaan Patani dan Dampak Perubahannya pada Kehidupan Masyarakat Melayu Patani*”. Hasil Penelitian jatuhnya kerajaan Patani disebabkan oleh perebutan kuasa dalam kalangan raja-raja Patani dan krisis puncaknya kepemimpinan. Kebijakan pemerintah Thailand berdampak terhadap umat Islam Melayu Patani dari segi masyarakat, karena kebijakan-kebijakan tersebut telah mencabut hak-hak masyarakat Melayu Patani sebagai bagian dari Siam. Masyarakat Melayu Patani tidak ingin diatur oleh pemerintah Thailand, karena mereka ingin mengatur diri mereka sendiri.

Hasil penelitian dan buku-buku yang disebutkan di atas menggambarkan bahwa fokus para penulis adalah pada aspek

---

<sup>9</sup> Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah perjuangan Melayu Patani, 1785-1954* (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006).(Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006).ix

<sup>10</sup> Irawan Yurisa, “Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Konflik Thailand Selatan” (PhD Thesis, Universitas Andalas, 2016).v

sejarah, hak asasi manusia dan peran organisasi *civil society*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas, karena penelitian ini fokus pada kajian sosiologi agama dan budaya yang berhubungan dengan permasalahan konflik identitas antara Muslim Melayu Patani dengan pemerintahan Thailand. Penelitian ini akan mendeskripsikan upaya-upaya masyarakat Patani dalam bentuk kegiatan kontestasi dan negosiasi serta reinternalisasi identitas sebagai muslim Melayu.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori negosiasi muka (*Face Negotiation Theory*) yang dikembangkan oleh Stella Ting Toomey. Menurut Toomey, teori negosiasi muka memberikan dasar bagi kita untuk memperkirakan bagaimana orang melakukan “kerja-muka” dalam berbagai budaya.<sup>11</sup>

Kerja muka atau *facework* didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang digunakan orang untuk membangun dan melindungi muka mereka atau mengancam muka orang lain. Teori *facework* digunakan untuk menghadapi kebutuhan atau keinginan mengenal diri sendiri dan orang lain:

1. *Facework* ketimbang rasa, batas dimana seseorang menghargai otonomi orang lain.
2. *Facework* solidaritas, menerima orang lain sebagai anggota dari kelompoknya.
3. *Facework* kepekaan memberikan lebih sedikit aspek negatif dan memperbanyak aspek positif.

Beberapa asumsi teori negosiasi muka mencakup komponen-komponen penting dari teori ini adalah:

1. Identitas diri penting di dalam interaksi interpersonal, dan individu-individu menegosiasikan identitas mereka secara berbeda dalam budaya yang berbeda.

---

<sup>11</sup>Morissan, *Teori Komunikasi - Individu Hingga Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),Hlm237.

2. Manajemen konflik dimediasi oleh (muka) dan budaya.
3. Tindakan-tindakan tertentu mengancam citra diri seseorang yang ditampilkan (muka).

Menurut Goffman, muka (*face*) adalah citra diri yang ditunjukkan orang dalam percakapan dengan orang lain. Toomey memaparkan secara jelas bahwa suatu proses adaptasi menghadirkan sebuah tantangan dan perubahan bagi individu individu yang mengalami.<sup>12</sup>

Teori negosiasi wajah ini sangat relevan untuk menjelaskan kondisi masyarakat Melayu Patani yang ada di kawasan Thailand Selatan. Timbulnya tantangan disebabkan ada dua lintas budaya yang berbeda (Melayu dan Siam), dan dua agama yang berbeda (Islam dan Buddha), sehingga muncullah konflik, ketika budaya yang satu memaksakan diri menjadi bagian dari budaya yang lain.

Berdasarkan teori negosiasi wajah, maka strategi penghindaran merupakan strategi penyelesaian konflik yang dilakukan dalam masyarakat kolektif. Strategi penyelesaian konflik dalam masyarakat muslim Melayu Patani dibutuhkan resolusi tentang konflik identitas oleh karena itu (*face expression*) sebagai strategi penyelesaian konflik di masyarakat Muslim Melayu Patani.

Konflik adalah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai fenomena baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial.<sup>13</sup> Dalam ilmu sosiologi konflik diartikan dengan istilah "konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin "con" yang berarti bersama dan "fligere" yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan

---

<sup>12</sup> Stella Ting-Toomey, *Communicating Across Cultures* (New York: The Guilford Publications, 1999), Hlm 233.

<sup>13</sup> Hugh Miall dan Oliver Ramsbotham, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan Mencegah dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 7–8.

pertikaian antara pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.<sup>14</sup>

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindarkan dan selalu akan terjadi.<sup>15</sup>

Menurut Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.

Menurut Coser ada dua bentuk dasar konflik yaitu konflik realitis dan konflik non-realitis. Konflik adalah konflik yang mempunyai sumber konkrit atau bersifat material, seperti perebutan wilayah atau kekuasaan dan konflik ini bisa teratasi kalau diperoleh dengan merebut tanpa perkelahian dan pertikaian.<sup>16</sup>

Konflik non realitis adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama dan organisasi-organisasi masyarakat dan konflik non-realitis adalah satu cara mempertegaskan atau menubuhkan ketegangan suatu kelompok. Dalam sejarah Patani baik masa kolonial maupun pada masa sekarang ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara negara atau antara aparat negara dengan warga negara baik secara individu

---

<sup>14</sup> Zeitlin Irving M, *Memahami Kembali Sosiologi* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998), 156.

<sup>15</sup> I.B Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi Dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 1.

<sup>16</sup> Lewis Coser, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 54.

- maupun kelompok, seperti pemberentakan bersenjata yang tujuannya memisahkan diri dari Pemerintahan Siam (Thailand).
2. Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok diberbagai lokasi seperti. Narathiwat, Yala dan Patani biasanya dilandasi oleh suatu sentimen subyektif yang mendalam diyakini warganya seperti sentimen kesukuan atau sentiment terhadap agama yang berbeda.

### C. Definisi Operasional

Agar lebih jelas dan tidak salah pengertian terhadap istilah yang terdapat dalam pokok pembahasan ini, maka dalam penelitian perlu di batasi istilahnya sebagai berikut:

1. Etnisitas.

Etnisitas berasal dari kata etnik *ethnos* yang berasal dari bahasa Yunani. Maka dari *ethnos* merupakan setiap komunitas sosial/etnik yang ditentukan, adat-istiadat, bahasa, nilai dan normal budaya.<sup>17</sup> Yang membedakan komunitas etnis Melayu muslim Patani dengan komunitas etnis Siam yang memiliki perbedaan<sup>18</sup> adat-istiadat, bahasa, nilai dan normal budaya dan agama.

2. Patani.

Patani adalah sebuah kerajaan Melayu yang dikenal dengan sebutan Patani Raya. Yang kini telah menjadi sebagian dari wilayah Thailand.<sup>19</sup> Wilayah Thailand selatan terdiri dari provinsi (*changwad*) diantaranya yaitu: Narathiwat, Yala, Patani, setun dan sebagian dari provinsi Songkhla yaitu wilayah Tibor, Canak dan Sebayor. Penduduk mayoritas di Thailand Selatan khususnya di tiga provinsi yaitu: Narathiwat, Yala, Patani, ada mayoritas etnis Melayu yang menganut agama Islam. Sedangkan diwilayah lainnya

---

<sup>17</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur* (Yogyakarta:Lkis, 2005), Hlm 8.

<sup>18</sup>  
<sup>19</sup> Siti Hawa Haji Salleh, *Hikayat Patani* (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 2010), Hlm9.

seperti Songkhla dan Satun lebih didominasi etnis Siam yang beragama Buddha.<sup>20</sup>

### 3. Gerakan.

Gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka. Upaya kolektif untuk mengendalikan perubahan atau untuk mengubah arah perubahan.<sup>21</sup> Gerakan adalah suatu kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perbaikan-perbaikan pada lembaga politik untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang baru melalui jalan politik.<sup>22</sup> Gerakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gerakan masyarakat Melayu dalam upaya reinternalisasi budaya Melayu yang dilakukan oleh masyarakat Melayu muslim Patani.

### 4. Konflik

Konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antara anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.<sup>23</sup> Konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik identitas yang terjadi karena perbedaan etnis, agama, budaya dan tatanan sosial lainnya yang menimbulkan pertikaian terhadap pemerintahan kerajaan Thailand dengan minoritas muslim Melayu Patani di Thailand Selatan.

### 5. Melayu.

Melayu adalah sebuah komunitas etnisitas *Austronesia* yang tersebar di kawasan di utara mulai dari segenting kra hingga pulau

---

<sup>20</sup> Ilham Nuereng, "Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam," *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 5, No.2, (Mei 2016), Hlm 300.

<sup>21</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 2 ed. (Preada Media: Jakarta, 2005), Hlm 325.

<sup>22</sup> Deni Kurniawan, *Kamus Istilah Politik Dan Kewarganegaraan* (Bandung: Yramawidia, 2006), Hlm 68.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) Hlm 99.

singapura selatannya. Sedangkan di utara meliputi burma dan annam atau dikenal dengan idonechina Perancis, semakin perjalan waktu wilayah Melayu semakin meluas di tepati ke seluruh daerah terutama pulau sumatera dan sebelah tenggara benua Asia termasuk juga kepulauan Hawai dan Jepang dibagian laut pasifik andaman, ceylon, naikobar, madagaskar dan bagian lautan india.<sup>24</sup> Menurut Anthony Milner, etnis ini diikat oleh banyak persamaan budaya, bahasa, kepercayaan, pakaian, dan tradisi lainnya. Mayoritas mereka adalah penganut agama Islam dan berkonsentrasi di wilayah Asia Tenggara.<sup>25</sup>



---

<sup>24</sup>Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerjaan Melayu Patani*, Cet 2 (Selangor: Universiti Antar Kebangsaan Malaysia, 2005), Hlm23–24.

<sup>25</sup>Mohamed Anwar Omar Din, “*Asal-Usul Orang Melayu: Menulis SemulaSejarahnya*,” 2011, Diakses 10April2019, <http://journalarticle.ukm.my/3186/1/1.pdf>. Hlm34

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam skripsi ini di Thailand Selatan tepatnya di provinsi Narathiwath Ampoen Bacho di Mukim Barittai. Adapun alasan tempat ini dijadikan lokasi penelitian karena tempat ini merupakan salah wilayah konflik dimana terjadi gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Siam (Thailand) untuk membebaskan diri di bawah kekuasaan pemerintahan Siam.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>26</sup> Menurut penjelasan Sugiono Peneliti ini memaparkan permasalahan dan pemecahan masalah penelitian dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklarifikasi data yang ada hubungannya dengan konflik identitas muslim Melayu Thailand Selatan. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan. Teknik studi lapangan merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta yang berkaitan dengan konflik identitas muslim Melayu Thailand Selatan.

#### **C. Sumber Data**

Data merupakan hal yang esansi untuk menguatkan suatu permasalahan dan juga diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Peneliti memperoleh data tersebut diantaranya dari:

##### **a. Data Primer**

Data primer penelitian ini bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Informasi adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan

---

<sup>26</sup> *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Hlm 301.*

informasi tentang situasi dan kondisi dalam penelitian. Data sekunder diperoleh dari data-data hasil wawancara dengan informan.

b. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah data diperoleh selama melakukan studi kepustakaan, berupa literatur maupun data tertulis yang berkenaan dengan penelitian konflik identitas muslim Melayu.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai bahan dalam penulisan Skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. *Observasi*. Observasi yang digunakan penulis observasi partisipan dengan mengikuti serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Penulis melakukan pengamatan langsung pada penelitian lapangan terhadap perubahan nilai-nilai sosial dan identitas masyarakat Melayu Thailand Selatan.
- b. *Wawancara*. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data Penelitian menggunakan Model wawancara langsung dan tidak langsung. Wawancara tidak berhadapan langsung misalnya, dengan menggunakan. Email, whatsapp, skype dan hal lainnya. Adapun subjek yang akan diwawancarai berjumlah 15 orang lebih kurang yaitu masyarakat Thailand selatan, khususnya di provinsi Narathiwat, tambon Bacho di Mukim Barittai.

Diantaranya yaitu : 1. Hasan Yamatibu ketua yayasan Bunga Raya Group. 2. Rusdy pengurus yayasan Bunga Raya Group. 3. Rozy pengurus Tadika Ban Hutan Jelor. 4. Khosaim Fathoni salah seorang sejarawan Thailand Selatan. 5. Mantan kombatan separtis. 6. Suaiwabah guru melayu. 7. Akak Yah (samsiyah), Nurinee dan Baha sebagai guru pondok dan tadika. 8. Haris using dan weamasing sebagai pelaku demonstran Takbai. Muctar pengurus masjid Wardi Husein.. 9. Sayutee sebagai mahasiswa. 10. Sabree, Abemad, 11. Sabree tahe sebagai guru pondok. 12. Samsidar, Harnanda, Rahmani sebagai relawan ACSTF di Thailand Selatan.

- c. *Informan Penelitian*. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat tambon Bacho di Mukim Barittai, provinsi Narathiwat, lebih kurang 15 responden dilakukan. Sebagian responden sudah mengidentifikasi beberapa responden individu maupun kelompok masyarakat Melayu yang layak menjadi responden penelitian.

Untuk memperkaya data penelitian ini menggunakan metode *snowball* untuk mencari responden informasi lebih mendalam terkait memelayukan Melayu kembali: konflik dan gerakan etnisitas Patani di Thailand selatan. Berdasarkan data atau informasi yang akan diperoleh dari responden sebelumnya sehingga peneliti dapat mengembangkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lengkap.<sup>27</sup>

- d. *Dokumentasi*. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa buku-buku tentang pendapat, photo-photo dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah konflik identitas Muslim Melayu Thailand Selatan: kontenstasi negosiasi dan resolusi.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm 301.

## **E. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengelolaan dan analisa data. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, klarifikasi data, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri atau orang lain.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan (*tambon*) Bacho Provinsi Narathiwat yang bersebelahan dengan wilayah (*amphae*) Sai Buri, Provinsi Patani. Pada tahun 1917 Bacho merupakan bagian dari wilayah Patani. Namun, pada tahun 1931 terjadi perubahan administrasi pemerintahan sehingga Bacho menjadi bagian dari Provinsi Narathiwat. Wilayah tersebut dibagi menjadi enam *tambon*. Salah satunya adalah Kecamatan Bacho yang kini berada di Narathiwat Timur.

Kawasan ini memiliki jumlah penduduk mencapai 47.831 jiwa dengan jumlah populasi laki-laki sebanyak 23.718 jiwa dan jumlah populasi wanita mencapai 24.113. Pada umumnya mata pencaharian utama masyarakat penduduk Bacho adalah pada sektor agraria, perkebunan perternakan dan hasil kekayaan laut.<sup>28</sup> Wilayah Bacho biasanya bermusim panas pada Febuari s.d. Juli dan bermusim hujan pada November s.d. Desember. Suhu rata-rata di sana mencapai 35,9 derajat Celcius.

### **B. Agama dan Budaya Masyarakat Melayu Patani**

#### **1. Karakter Masyarakat Melayu Patani**

Pengaruh agama Islam yang kuat sangat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat Patani dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dalam kehidupan sosial budaya etnis Patani yang berbagai unsurnya telah diwarnai dengan ajaran Islam. Di sisi lain praktik-praktik keagamaan juga mereka sesuaikan dengan tradisi atau adat istiadat yang berlaku. Agama dan budaya masyarakat Patani telah menyatu sehingga sukar untuk dipisahkan.

---

<sup>28</sup> Amphoe, “ข้อมูลอำเภอ-สถานที่ท่องเที่ยว-ติดต่อราชการ,” 9 September 2019 [Http://amphoe.com/menu.php?mid=1&am=285&pv=24](http://amphoe.com/menu.php?mid=1&am=285&pv=24).

## 2. Budaya Masyarakat Melayu Patani

Berbicara tentang masyarakat Melayu Patani tidak terlepas dari tradisi Melayu-Islam, seperti tradisi berpergian ke *surau* (masjid) dan tempat pengajian untuk mencari ilmu agama serta tradisi yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu lainnya. Di samping itu, banyak ditemui pondok-pesantren yang menjadi kesatuan budaya masyarakat Patani dalam mencari ilmu agama.

## 3. Kenduri Yang Berkaitan Hari-hari Besar Agama

### 1. Kenduri Maulid

Pelaksanaan kenduri maulid merupakan bentuk sukacita dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. yang terakhir sebagai pembawa dan penyebar ajaran agama Islam.<sup>29</sup> Kenduri ini sering dilakukan oleh masyarakat Patani pada waktu malam setelah isya. Ada ciri khas tersendiri dari pelaksanaan maulid di Patani. Biasanya pemuka *kampung* 'desa' dari *tok imea* (imam masjid) beserta aparaturnya mendatangi rumah yang menyelenggarakan kenduri tersebut. Setiba di rumah pelaksana kenduri maulid, pemilik rumah memberikan uang dan membagikan wewangian kepada tamunya. Masyarakat Patani sebagai penganut agama Islam melakukan kenduri maulid setiap bulan Rabiulawal sampai dengan berakhirnya bulan Rabiulakhir.

### 2. Isra Mikraj

Isra Mikraj dilakukan untuk memperingati peristiwa perjalanan Nabi Muhammad saw. dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratulmuntaha pada malam hari untuk menerima perintah salat lima waktu. Sama halnya seperti kenduri maulid, masyarakat Patani juga memperingati Isra Mikraj. Hanya saja kenduri yang dilaksanakan lebih sederhana. Acara ini biasanya diisi dengan ceramah tentang peristiwa Isra Mikraj oleh *tok imea* 'imam masjid' dan juga disajikan nasyid yang dilantunkan oleh laki-laki.

---

<sup>29</sup> Hasil observasi dan wawancara dengan akak Yah istri Imam Masjid. Ban Hutan Jelor pada 29 November 2018.

### 3. Sepuluh Muharram

Masyarakat Patani menyebutnya Hari *Asyuro*. Acara ini dilaksanakan untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad saw, yakni Hasan dan Husen. Pelaksanaanya dilakukan oleh kaum wanita dan kaum laki-laki turut bepartisipasi pada siang hari. Acaranya dilaksanakan di *tadika* ‘taman kanak-kanak’ dan surau-sarau. Masyarakat juga membuat dodol yang dibagi-bagikan kepada semua penduduk desa.

### 4. Kenduri Yang Berkaitan Dengan Kehidupan

#### 1. Upacara Kematian

Pada umumnya masyarakat Patani melaksanakan upacara kematian menurut ketentuan adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur mereka. Adat istiadatnya tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam. Dalam upacara penguburan, *tok imea* yang memimpin upacara membaca talqin dari sebuah kitab disertai doa bagi orang yang meninggal. Semua orang yang hadir kemudian membaca zikir dan membaca kitab suci Alquran selama tujuh hari untuk arwah tersebut.

#### 2. Upacara Barang Baru

Upacara ini pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Patani yang memiliki benda atau barang baru, seperti rumah, mobil, dan hal lain yang bersifat materi. Tujuannya adalah untuk memperoleh keberkahan dan keselamatan bagi pemilik benda tersebut. Upacara ini dilaksanakan pada malam hari setelah salat isya dan dipimpin oleh *tok imea*.

### 5. Bahasa Masyarakat Patani

Bahasa merupakan identitas yang menunjukkan ciri khas suatu komunitas tertentu. Komunitas muslim Melayu Patani masih mempertahankan bahasa Melayu dengan sangat baik hingga saat ini walaupun sebagian mereka tidak dapat berbicara, tidak dapat menulis, bahkan tidak dapat membaca dengan bahasa Melayu,

tetapi menggunakan bahasa Thai-Siam. Ini terlihat dari perubahan sosial budaya mereka setelah penaklukan wilayah pada tahun 1978.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat Patani terdiri atas dua golongan masyarakat, yaitu *heasoe* dan *ugama*. *Heasoe* adalah golongan masyarakat modern di Patani yang menerima semua program-program Siam (Thailand) sehingga mereka lebih berkembang. Sedangkan *ugama* adalah golongan masyarakat tradisional Patani, termasuk di antaranya pemuka agama, seperti imam masjid, santri-santri, dan guru agama yang cenderung memiliki fanatisme yang tinggi terhadap identitas mereka. Karena itu, mereka menolak semua program-program pemerintah sehingga lebih tertinggal baik dari segi pembangunan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>31</sup>

Golongan *ugama* menjadi tumpuan resistensi masyarakat Patani di tengah pergulatan politik, budaya, dan hukum untuk menjaga kebudayaan lokal termasuk identitas muslim Melayu Patani yang terbentuk melalui akulturasi antara Islam dengan budaya Melayu hingga berakulturasi di tengah serbuan budaya luar (Thai-Buddha).

Selain itu, menurut pengamatan penulis, penduduk muslim Patani dari sisi sosiologi masyarakat di tiga wilayah tersebut berada di kawasan perdesaan yang masih mempraktikkan tradisi budaya leluhur mereka. Ikatan sosial juga masih terjaga dan dipayungi oleh jiwa sosial dan rasa solidaritas tinggi terhadap sesama masyarakat muslim Melayu Patani, seperti dalam hal mendirikan masjid dan sekolah tadika sebagai resistensi identitas mereka sendiri.

Agama sebagai media solidaritas untuk merlawanan dominasi kelompok tertentu sudah berlangsung berjalan lama. Namun, agama sebagai bagian dari identitas wilayah Patani di

---

<sup>30</sup> Hasil observasi Penulis dan wawancara dengan Sobree Tahe guru pondok Witya Durasat di Ban Beres, Bacho pada 31 Juni 2019.

<sup>31</sup> Hasil observasi Penulis dan wawancara Sobree Tahe dan Sayutee, dengan salah satunya Guru Pondok dan Mahasiswa Patani di Ban Klorek pada 28 Juli 2019.

akulturasi dengan identitas nasional (Thai-Buddha) kini menunjukkan fenomena menonjol. Perbedaan kepentingan politik dan budaya, antara komunitas etnis dan agama terhadap pemerintahan pusat membentuk identitas politik yang menyangkut konflik dan kekerasan yang berlarut-larut terjadi di banyak kawasan.<sup>32</sup> Konflik dan kekerasan tersebut terutama terjadi di Bacho, Narathiwat, dan wilayah lainnya yang merupakan daerah pribumi muslim Melayu yang mendiami Patani.

### C. Perkembangan Islam di Patani

Islam mulai berkembang di Patani setelah Raja Patani, yakni Phya Tu Nakpa memeluk agama Islam. Raja tersebut mengganti namanya dari Phya Tu Nakpa menjadi Sultan Ismail Syah Zilullah Din Alam. Seluruh anggota keluarganya turut digantikan nama menjadi Sultan Muzaffar Syah (*Krub Pichai Paina*), Siti Aisyah Tengku (*Maha Chai*), dan Sultan Mansyur Syah (*Maha Chai Pailang*).<sup>33</sup> Istilah pemimpin kerajaan pun diganti dari “raja” menjadi “sultan”.

Syed Naguib Al-Attas menjelaskan bahwa kedatangan Islam pertama kali ke Patani pada hari Jumat, 4 Rajab 702 H bertepatan dengan 22 Februari 1303 M.<sup>34</sup> Jenis dan bentuk batu nisan Raja Patani, Ismail Syah, yang sama persis dengan batu nisan Raja Pasai, Aceh, yang bernama Sultan Malik As-Salleh juga menjadi salah satu bukti yang menguatkan. Hal tersebut menegaskan bahwa Islam masuk ke wilayah Patani pada 1297 Masehi.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> David Brown, “From Peripheral Communities to Ethnic Nation: Separatism in Southeast Asia, Pacific Affairs 1” No, 61 (1988) Hlm51–77.

<sup>33</sup> Nik Mahmud, *Sejarah perjuangan Melayu Patani, 1785-1954*, hlm. 23.

<sup>34</sup> Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik* (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, 1993), hlm. 123.

<sup>35</sup> Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerjaan Melayu Patani, Cet 2* (Selangor: Universiti Antar Kebangsaan Malaysia, 2005), Hlm 250.

Mayoritas muslim di Patani adalah pengikut sunni dan bermazhab syafi'i.<sup>36</sup> Peninggalan corak keislaman yang masih dapat dijumpai di Patani saat ini di antaranya adalah Masjid kuno dan mushaf Alquran yang berasal dari beberapa negara. Salah satunya yaitu mushaf Alquran yang ditulis oleh Nuruddin Arraniry.<sup>37</sup>

Islamisasi di kawasan Asia Tenggara berkaitan erat dengan beberapa tokoh Indonesia yang telah banyak berkontribusi terhadap penyebaran agama Islam ke wilayah Patani, Thailand. Beberapa tokoh tersebut adalah sebagai berikut.

### 1. Tok Pasai

Syekh Said atau dikenal dengan Tok Pasai merupakan salah seorang ulama yang menyebarkan Islam ke Patani sekitar abad ke-15 Masehi. Selain pendakwah, beliau juga seorang ahli kesehatan dan pengobatan. Beliau dikenal dengan kemampuannya menyembuhkan beragam penyakit. Namanya semakin dikenal setelah ia menyembuhkan penyakit raja, yakni Sultan Ismail Syah (*Phya Tu Nakpa*). Setelah raja memeluk Islam, Islam berkembang pesat dan simbol-simbol Islam semakin terlihat di banyak tempat. Perkembangan Islam membuat Patani diberi gelar "Darussalam".

### 2. Wardi Husen

Tokoh berikutnya adalah Wardi Husen, yaitu salah seorang ulama yang berasal dari Pulau Jawa yang ditugaskan oleh Kerajaan Demak untuk membangun peradaban Islam di wilayah Patani. Peran Wardi sebagai seorang ulama dari tanah Jawa telah banyak berkontribusi pada penyebaran agama Islam di kawasan Patani. Ia bahkan mendirikan masjid di sana pada tahun 1768.<sup>38</sup> Wardi

---

<sup>36</sup> Syukri, *Sejarah Kerjaan Melayu Patani*, hlm. 260.

<sup>37</sup> Di lihat "Musium Al-quran" di Lubok Sawoh, Narathiwat (Manuskrip, 29 September 2018).

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Muctar, pengurus Masjid Wardi Husein, di Ban Teluk Manok Narathiwath, 29 Juli 2019.

memfungsikan masjid untuk beberapa hal, di antaranya sebagai tempat pertahanan melawan serangkaian akulturasi Siam dan sebagai tempat pengembangan pendidikan yang berbasis pondok pesantren.

Mahakarya Wardi berupa masjid tersebut merupakan tempat ibadah tertua yang telah berusia 300 tahun lebih<sup>39</sup>. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Telok Manok. Hingga kini masjid tersebut dijadikan sebagai tempat kajian ilmu pengetahuan. Masjid tersebut terletak di Bacho, Provinsi Narathiwat yang merupakan salah satu dari empat provinsi yang berada di Thailand Selatan. Arsitektur masjid ini hasil perpaduan antara arsitektur Cina, Melayu, dan Jawa. Bentuk kubah masjid menyerupai rumah kecil yang bergaya arsitektur Jawa.

#### **D. Awal Mula Konflik di Patani**

Konflik terjadi secara tidak langsung pada masa Raja Kerajaan Siam, Chulalongkorn (1868-1910). Konflik terjadi karena terpengaruh oleh nasionalisme barat. Raja memperkenalkan model negara-bangsa melalui reformasi kebangsaan Thai, di antaranya *Rathaniyom* dan *Thesaphiban*.<sup>40</sup> Perjanjian tersebut mengubah Patani Raya (*Greater Patani*) menjadi tujuh wilayah, di antaranya: Patani, Saiburi, Menara (Narathiwath), Raman Jambu, Jaha (Yala), dan Jelor. Kepemimpinannya masih diberikan kepada masyarakat pribumi Melayu-Patani.<sup>41</sup>

Pada 10 Maret 1909, Kerajaan Siam dan Inggris menyepakati suatu perjanjian, yakni Perjanjian Anglo-Siamse yang berisi tentang pembagian wilayah kekuasaan antara Kerajaan Siam dan Inggris. Perjanjian itu menegaskan kembali Patani sebagai wilayah Siam. Adapun wilayah Melayu Selatan yang terdiri atas Kelantan, Kedah, Terangganung Perlis, dan Pulau Langkawi berada

---

<sup>39</sup> Muctar, pengurus Masjid Wardi Husein Pada 29 Juli 2019.

<sup>40</sup> Syukri, *Sejarah Kerjaan Melayu Patani*, hlm. 17–49.

<sup>41</sup> Nik Mahmud, *Sejarah perjuangan Melayu Patani, 1785-1954*, hlm. 21.

di bawah Kolonial Inggris<sup>42</sup> yang saat ini berada di wilayah Malaysia.

Penerus Chulalongkorn, Raja Wachiravut (1910-1925) yang lahir dan tinggal lama di Eropa khususnya di Inggris kemudian memperluas lingkup inkorporasi wilayah Patani dan mengadopsi konsep negara-bangsa barat lebih ketat. Ia memperkenalkan patriotisme yang menjadi salah satu ciri nasionalisme barat dengan mendirikan kelompok paramiliter untuk menjaga wilayah nasional kerajaan Siam ketika itu.<sup>43</sup>

Siam bertransformasi menjadi Thailand dengan membentuk otoritas monarki konstitusional pada abad ke-19. Transformasi ini menerapkan ideologi baru, yaitu bangsa, raja dan agama. Tiga wajah otoritas baru Thailand-Buddha ini merupakan serangkaian hal baru untuk menjadikan Thai-Buddha sebagai bangsa yang besar. Wajah pertama, bangsa, menunjukkan kesatuan bangsa, yaitu bangsa Thai-Buddha. Wajah kedua, raja merujuk pada Dinasti Chakri yang memulihkan modernisasi di Thailand sejak abad ke-10 M. Wajah ketiga, agama, merujuk pada agama bangsa Thai-Buddha, yaitu Theravask.

Program kebijakan Thai-Buddha semakin fundamental diantaranya:

#### 1. Kebijakan Thesaphiban

Modernisasi atau nasionalisme Thailand yang dimulai oleh Raja Chulalongkorn juga merambah pada agama. Dia memelopori berdirinya organisasi keagamaan yang anggotanya terdiri atas *Bhikku* yang disebut *Sangha* pada akhir abad ke-19.<sup>44</sup> Kebijakan ini berdampak terhadap masyarakat muslim Patani pada masa pemerintahan Raja Chulalakovong yang memperkenalkan konsep

---

<sup>42</sup> Maszlee Malik, *Jalan Damaim Menuju Damai Di Patani Kronologi Perjuangan Muslim Di Patani Darussalam* (Pulau Pinang: Aman Patani, 2012), hlm. 3.

<sup>43</sup> Ahmad, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai'' Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*, hlm. 45.

<sup>44</sup> Ahmad, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai'' Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*, hlm. 63.

*Thesaphiban*, yaitu reformasi administratif dari Melayu menjadi reformasi Siam pada tahun 1897. Kebijakan tersebut mulai diimplementasikan pada tahun 1902 sampai 1906.<sup>45</sup>

Perubahan terlihat setelah kepemimpinan perdana menteri Luang Phibul Songgram pada tahun 1939. Perubahan sistem pemerintahan semakin berkecamuk ketika kebijakan *Rathaniyom*, yaitu reformasi ke budaya Siam diimplementasikan ke seluruh penjuru negeri termasuk Patani pada tahun 1940. Saat itu muncul kebijakan mengenai larangan memakai simbol adat daerah yang menjadi ciri khas muslim Melayu, seperti larangan menggunakan bahasa Melayu, larangan menggunakan nama Melayu, dan penutupan sekolah yang didirikan oleh masyarakat Patani terutama pondok pesantren.

Pada masa pemerintahan Phibul yang kedua juga diperkenalkan Undang-Undang Darurat (*Martial Law*) yang mengatur kebijakan bahwa pemerintah dapat menahan orang selama 7×24 jam tanpa bukti awal. UU tersebut masih berlaku hingga kini dengan alasan untuk memberantas bandit yang memperjualbelikan narkoba. Stigma “bandit” dan “teorisme” nantinya digunakan pada era Thaksin Shiwantra dalam menangani serangkaian kekerasan 2003-2004 yang berpuncak pada tragedi April 2004.<sup>46</sup>

## 2. Kebijakan Darurat Militer

Kebijakan ini dimulai pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shiwantra. Pada 4 Januari 2004, terjadi penyerangan oleh kelompok bersenjata di basis militer di Joh Ai-Rong disertai pencurian persenjataan di gudang militer pada 28 April.

---

<sup>45</sup> Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah perjuangan Melayu Patani, 1785-1954*, hlm 55.

<sup>46</sup> Suaedy Ahmad, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai'' Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*, Center for Islam and Southeast Asia Studies The WAHID Institute (CISEAS-WI) (Jakarta: Puslitbtur dan Khazanah Keagamaan badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan CISEAS-THE WAHID Institute, 2012), hlm. 32.

Menurut penjelasan Khosam, tragedi April 2004 di Masjid Kresik dipicu oleh sekelompok orang bersenjata dari kalangan pribumi Melayu yang melakukan penyerangan di salah satu pos penjagaan tentara di kawasan Kresik. Akibatnya, korban berjatuhan dari pihak tentara yang berpatroli di kawasan Kresik hingga berbuntut panjang. Tersangka penyerangan berlingung di salah satu masjid bersejarah yang saat ini dikenal dengan Masjid Kresik. Masjid tersebut dulunya merupakan salah satu pusat pemerintahan kerajaan pada masa Sultan Muzafar Syah. Kelompok yang melakukan penyerangan tersebut dikepung oleh tentara hingga terjadinya baku tembak dan menewaskan kelompok bersenjata.

Pada 25 Oktober 2004 terjadi demonstrasi besar di kawasan Takbai yang menuntut dibebaskannya tahanan yang dituduh melakukan kerja sama dengan pencuri di gudang senjata di Ai-Rong. Namun, polisi menembak secara membabi-butu terhadap kawanan demonstran di jalan yang akhirnya menewaskan 78 demonstran di atas truk kepolisian dalam perjalanan menuju tahanan kepolisian Patani.<sup>47</sup> Semua tragedi tersebut membuat kondisi tidak lagi kondusif sehingga pemerintah semakin agresif dalam bertindak dengan kebijakan *Martial Law* yang sudah berlaku sebelumnya pada masa Phibul. Aparat masih dapat melakukan penahanan selama 7×24 jam tanpa bukti yang cukup kuat. Aparat dapat menangkap siapa saja yang dicurigai.<sup>48</sup>

### **E. Gerakan Etnisitas Melayu Di Patani**

Di samping munculnya berbagai pengabaian terhadap kebudayaan muslim Melayu Patani yang mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan etnisitas Melayu, juga muncul kelompok atau komunitas baru. Mereka diwakili oleh komunitas *civil society*, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Khosam Fathoni, Penulis buku: Sejarah Empiyar Melayu Patani, di Sungai Gulok, Narthiwath pada, 24 Juli 2019.

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Haris Useng dan Waemasing salah satu demonstran Takbai, di Ban Klorek, Pada 27 Juli 2019.

komunitas budaya, komunitas keagamaan, dan aksi-aksi yang bersifat individual bahkan berkelompok.

Secara nasional munculnya komunitas-komunitas tersebut tidak terlepas dari dinamika tuntutan keterlibatan dan demokratisasi di dalam negeri Thailand. Hal ini juga dipengaruhi oleh munculnya dorongan *civil society* yang bersifat global, termasuk berbagai bentuk bantuan internasional yang secara langsung maupun tidak langsung ikut memperkuat komunitas lokal (Patani) tersebut. Di antaranya adalah bantuan persenjataan yang dikirim langsung oleh negara Islam terutama Libya dan Aceh, Indonesia. Bahkan mereka juga melakukan pelatihan militer di Libya.<sup>49</sup>

Perbedaan identitas ini mendorong resistansi berupa pemberontakan bahkan kekerasan.<sup>50</sup> Menurut Khosaim, representasi melalui peran agama sebagai media seperti perjuangan, kelompok guru-guru pondok pesantren, dan tokoh-tokoh tarekat sufi serta pemimpin agama yang kharismatik memberikan peran penting dalam mendorong komitmen dan gerakan perlawanan di Patani.

Lahirnya gerakan etnisitas di Patani disebabkan semangat Haji Sulung dalam memperjuangkan hak masyarakat Patani. Hal itu juga disebabkan oleh adanya pembatasan (marginalisasi) dan pengabaian kebudayaan leluhur minoritas Melayu yang dulu dikenal dengan sebutan Patani Raya. Mereka kehilangan kekuasaan pada masa raja Melayu Patani sehingga terjadi benturan antara budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya sebelumnya.<sup>51</sup>

Menurut penelusuran Thanet Aphornsuva, ada dua komunitas etnis yang sekarang masyhur di Thailand, yaitu Melayu Patani-Islam dan Siam-Buddha. Kini disebut Thailand Selatan yang dulu masyarakatnya hidup rukun meskipun mereka berbeda agama

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan salah satu mantan Kombatan Patani yang tidak dapat disebutkan namanya, di Bacho, Ban Beres, pada 29 September 2018.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Khosaim di Sungai Gulok, Narathiwat pada 14 Juli 2019

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Sobree Tahe dan Sayutee dan Observasi Penulis dengan Guru Pondok dan Mahasiswa Patani, pada 16 Juli 2019.

dan etnis. Konflik dan kekerasan muncul ketika kerajaan Siam membangun nasionalisme modern Thailand dalam bentuk kerajaan konstitusional.

Dalam pembentukan nasionalisme Thailand Siam lebih memprioritaskan identitas nasional sekaligus memperkenalkan sistem baru dalam negara-bangsa (*nation-state*) yang disebut modernisasi.<sup>52</sup> Kebijakan itu menimbulkan kemarahan masyarakat Patani sehingga lahir gerakan perlawanan etnis Melayu yang ada di Patani, yaitu BRN, PULO, BNPP. Gerakan yang masih aktif adalah BRN.<sup>53</sup> Pada periode inilah muncul perlawanan mulai dari pemogokan sipil, seperti tidak mengikuti sistem pendidikan dengan tetap menerapkan sistem tradisional di pondok pesantren sampai penggunaan bahasa *Rumi* (Melayu) di lembaga pendidikan hingga pemberontakan bersenjata.<sup>54</sup>

Perlawanan terhadap politik peyeragaman bahasa Thai pernah menghambat komunikasi antar masyarakat. Di Thailand Selatan, misalnya, ditetapkan politik bahasa dengan memaksa bahasa Thailand sebagai bahasa nasional di sekolah, termasuk di sekolah Islam dan pondok dengan melarang penggunaan bahasa Melayu.

Pemaksaan bahasa Thailand mempengaruhi proses pembelajaran agama Islam di lembaga pendidikan. Sebab, Komunitas muslim di Patani menolak untuk menggunakan bahasa Thailand. Mereka tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu mereka dalam pengajaran Islam ketika berkomunikasi dengan pemerintahan pusat. Konflik tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya identitas agama-etnik (Islam-Melayu) komunitas di

---

<sup>52</sup> Thanet Aphornasuvan, *Thanet Aphornasuvan, "Nation-State and the Identity in the Southern Unrest and Violence,"* dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt., eds. *Understanding Conflict and Approaching peace in Southern Thailand* (Bangkok: KAS, 2006), Hlm92–129.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Abeamad, Sabree, dan Abdullah, keluarga dari gerakan etnisitas Kemelayuan Patani, Pada 28 Juni 2019.

<sup>54</sup> *Thanet Aphornasuvan, "Nation-State and the Identity in the Southern Unrest and Violence,"* dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt., eds. *Understanding Conflict and Approaching peace in Southern Thailand*, Hlm 110–15.

Patani. Mereka berhadapan dengan Siam (Thailand) yang beragama Buddha selaku mayoritas dan direpresentasikan oleh pemerintahan pusat.<sup>55</sup>

## **F. Tahap Perkembangan Gerakan Etnisitas Melayu Patani**

Kehadiran bangsa Thai mengubah sosiokultural masyarakat Muslim Patani. Keadaan tersebut tampak pada aneksasi Thai-Buddha dan akulturasi terhadap kebudayaan Muslim Melayu Patani melalui jalur politik, budaya, hukum, dan pendidikan. Akulturasi melalui Jalur politik dilakukan dengan mengembangkan pemahaman bangsa, raja, dan agama yang menyatukan semua warga negara dalam satu nasionalisme Buddha. Akulturasi melalui jalur budaya dilakukan melalui program migrasi penduduk utara ke selatan dan membentuk perkampungan Buddha. Adapun melalui jalur hukum dilakukan melalui intervensi kewenangan *Dato' Yuthithum*, yaitu peradilan agama Islam dan melalui jalur pendidikan dilakukan dengan diwajibkannya mempelajari sejarah bangsa Thai bahkan pelajaran keagamaan Buddha diikutsertakan dan masih berlaku sampai saat ini.<sup>56</sup>

Program otoritas ini mendapat perlawanan dari masyarakat muslim Patani karena dianggap sebagai upaya dekulturisasi kebudayaan muslim Melayu yang menjadi identitas mereka. Perlawanan dari program otoritas pusat tersebut sebagai usaha untuk mendapatkan otonomi di wilayah Patani. Masyarakat Patani memaknai bahwa setiap upaya yang dilakukan diniatkan untuk jihad, yakni sebagai bentuk pengabdian mereka atas rasa cinta atau nasionalisme terhadap Melayu Patani dan agama.<sup>57</sup> Alhasil, lahirlah gerakan etnisitas seperti di bawah ini:

---

<sup>55</sup> Imtiyaz Yusuf, *The Ethno-Religious Dimension of the Conflict in Southern Thailand*, dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, *Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand* (Bangkok: KAS, 2006), Hlm 176–179.

<sup>56</sup> Sodikin, “Budaya Muslim Patani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya)’ Vol.14,No.1, Januari-Juli 2016 (1 Juni 2016): Yusuf,Imtiyaz .2009”*Dalam Ethno Religious and Political Dimensions of The Southern Thailand Conflict.*,” Hlm 32.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan salah satu mantan Kombatan Patani yang tidak dapat disebutkan namanya, di Ban Klorek pada 29 September 2018.

## 1. Gerakan Etnisitas Kemelayuan Patani Awal (1947-1948)

Muhammad bin Haji Abdul Qadir bin Muhammad bin Tuan Minal atau yang dikenal dengan Haji Sulong adalah salah satu tokoh pertama Patani yang melakukan gerakan perlawanan dengan cara damai pada tahun 1947. Beliau adalah seorang ulama kharismatik dan juga Bapak Nasionalisme Patani. Perannya dalam memelayukan muslim Melayu Patani tampak dalam usahanya mendirikan sebuah lembaga keagamaan yang bernama *Madrasah al- Maaqifah Wataniah Fattani* yang diresmikan oleh Perdana Menteri Siam pada tahun 1933.<sup>58</sup>

Pada dasarnya tujuan Sulong meminta otonomi untuk menjaga kearifan kebudayaan lokal dilatarbelakangi oleh perubahan administratif negara, yaitu *Rathaniyom* yang menyatukan seluruh warga Thai dalam pemahaman raja, bangsa/ Monarki, dan agama. Pada 16 Januari 1948, Muslim Melayu Patani di bawah pimpinan Sulong menyampaikan tujuh tuntutan bagi pembentukan daerah otonomi.<sup>59</sup>

## 2. BRN ( *Liberation Front of Republic Patani* )

BRN dikenal dengan nama lain *Liberation front of Republic Patani* (LFRP) atau BRN *Puak B*.<sup>60</sup> Lahir sekitar tahun 1960. BRN didirikan oleh seorang aristokrat yang bernama Abdul Karim Hassan, seorang guru senior pondok di wilayah Ruso, Narathiwat. Kemunculan BRN dipicu oleh program reformasi pendidikan pemerintahan sejak tahun 1961. Reformasi pendidikan yang dilakukan, yakni diubahnya kurikulum dengan memasukan pendidikan sekuler dan menutup sekolah yang menolak pembaruan sistem pendidikan. Kebijakan pemerintahan ini mendapat penolakan keras dari para guru agama karena dianggap menjadi salah satu upaya penghancuran identitas Melayu dan Islam.

---

<sup>58</sup> Muhammad Kamal K.Zaman, “13 Ogos” (Unpublished, 1996),Hlm 1–9.

<sup>59</sup> K.Zaman, “13 Ogos” Hlm17.

<sup>60</sup> A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik* Hlm 323.

Hal tersebut menjadi latar belakang Hassan yang berprofesi sebagai guru pondok untuk mendirikan BRN sebagai wadah perjuangan. BRN memiliki ideologi yang cenderung progresif. BRN menganut sosialisme sebagai ideologi yang dianggap mencerminkan perjuangan mereka dengan Islam. Sosialisme Islam dianggap sebagai pilihan terbaik untuk memperjuangkan visi mereka.<sup>61</sup>

BRN tidak memfokuskan pada kegiatan perang gerilya, tetapi lebih fokus pada organisasi politik pembebasan Patani agar merdeka. Cita-cita ini juga ditempuh melalui jalur pendidikan khususnya di sekolah-sekolah agama yang didirikan sebagai bentuk reinternalisasi. Meskipun tidak berjuang melalui jalan perang, BRN tetap memiliki sayap militer yang dipimpin oleh Jehku Baku atau Mapiyor.<sup>62</sup> Alih-alih membentuk pemerintahan Islam tradisional, tujuan BRN lebih kepada pembentukan republik Islam sosialis.<sup>63</sup> Target Patani merdeka difokuskan untuk empat provinsi dengan mayoritas muslim di Thailand Selatan, yaitu: Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun (Songkhla). Gerakan BRN ini masih eksis di tengah komunitas etnis muslim Melayu Patani sampai saat ini.<sup>64</sup>

Menurut pemerintah Thailand, organisasi ini memiliki pasukan gerilya dengan perlengkapan yang cukup. Kebanyakan berasal dari pemimpinnya yang menempuh pendidikan di luar negeri, khususnya Malaysia dan Indonesia.<sup>65</sup> Namun, apa yang peneliti dapatkan bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan. BRN tidak fokus dengan gerakan militer (separatis). Hasil yang ditemukan justru BRN memiliki kaitan erat dengan gerakan bersenjata selain gerakan reinternalisasi Melayu dalam bentuk

---

<sup>61</sup> A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik* Hlm 324–326.

<sup>62</sup> Republik Esosialis Tawon, “Sejarah Konflik Berdarah di Thailand Selatan | RE Tawon,” Republik Esosialis Tawon, 16 Februari 2012, <https://www.re-tawon.com/2012/02/sejarah-konflik-berdarah-di-thailand.html?m=1>.

<sup>63</sup> Surin Pitsuwan, *Islam and Malay Nationalism; A Case Study of The Malay Muslims Of Southern Thailand, Terjemahan* (Bangkok: LP3ES, 1985), Hlm 177.

<sup>64</sup> A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, Hlm 335.

<sup>65</sup> Siful Muzani, *Pembangunan dan Kegiatan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1993), Hlm 174.

pendidikan. Salah satu buktinya, yakni ditemukan banyak anggota BRN yang ditangkap dalam lingkungan pondok pesantren, baik itu golongan pemuda maupun orang tua.<sup>66</sup>

### 3. PULO ( *United Liberation Organization* )

PULO (*United Liberation Organization* ) adalah nama lain dari Pertumbuhan Persatuan Pembebasan Patani (PPPP). PULO dibentuk pada tahun 1968 oleh Kabir Abdul Rahman atau juga dikenal sebagai Bira Kotanila. Ia mendirikan PULO di India setelah menyelesaikan studi ilmu politik di sana. Latar belakang yang mempengaruhi Bira untuk membentuk PULO adalah ketidakpuasannya melihat gerakan perlawanan Melayu yang tidak efektif dan juga kurangnya kesadaran masyarakat perihal politik dan pendidikan.<sup>67</sup>

PULO merupakan organisasi penengah antara BNPP dan BRN karena PULO tidak membatasi pemimpin dan anggotanya dari kelompok tertentu. Selain itu, PULO tidak terkait dengan ideologi sosialisme dan bukan Islam konservatif. PULO berusaha menengahi organisasi dengan ideologinya *Ubangtapekma* yang berarti agama, bangsa, tanah air, kemanusiaan.<sup>68</sup> Ideologi PULO cenderung mengayomi berbagai elemen di Thailand Selatan untuk kontribusi dalam perjuangan melalui PULO.

### 4. BNPP ( *National Liberation Front Of Patani* )

BNPP atau dikenal dengan NLFP (*National Liberation Front of Patani*) merupakan salah satu gerakan etnisitas yang ada di Patani yang hadir sekitar tahun 1970.<sup>69</sup> Gerakan ini didirikan oleh seorang aristokrat yang bernama Tengku Abdul, seorang dari keturunan bangsawan yang mayoritas pemimpinnya merupakan elit

---

<sup>66</sup> Hasil Observasi dan wawancara dengan mantan Kombatan Patani yang tidak dapat disebutkan namanya, di Ban Duku pada 18 September 2018.

<sup>67</sup> “Sejarah Konflik Berdarah di Thailand Selatan | RE Tawon.”

<sup>68</sup> A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, Hlm 325.

<sup>69</sup> A. Malek *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, Hlm 318.

kesultanan Patani. Tujuan BNPP adalah untuk memperjuangkan kejayaan masa lalu yaitu mendirikan negara Otonom Federasi Malaysia dengan sistem kerajaan yang konservatif.<sup>70</sup>

Gerakan etnisitas kemelayuan yang masih berperan aktif di Patani saat ini hanya gerakan BRN saja. PULO dan BNPP sudah lama tidak terdengar kabar dan hanya meninggalkan nama organisasi mereka. Namun, sebagian dari anggota seperti PULO dan BNPP telah menyadari dampak konflik. Karena itu, mereka telah hidup seperti masyarakat sipil pada umumnya yang berdampingan dengan pemerintahan Siam. Mereka telah menjadi orang-orang religius bahkan ada yang sudah membuka lembaga pendidikan yang berbasis pondok pesantren sebagai bentuk perjuangan mereka.<sup>71</sup> Selain itu, di antara mereka juga ada yang telah menjadi tokoh-tokoh keagamaan di tengah komunitas mereka sendiri.

### **G. Reinternalisasi Kemelayuan Masyarakat Patani**

Gerakan *civil society* mulai berkembang saat ini ketika masyarakat mulai kritis. Demokratisasi di dalam negeri, permasalahan di jalur pendidikan, pengabaian kebudayaan, dan konflik berkepanjangan antaragama melahirkan lembaga-lembaga dan organisasi yang menengahi konflik, seperti yang disalurkan oleh lembaga lokal Bunga Raya Group dan lembaga lokal lainnya. Beberapa lembaga bantuan dari luar negeri juga turut berkecimpung.

Banyak upaya yang dilakukan untuk mempertahankan identitas Melayu di tengah kondisi masyarakat Patani dan kebijakan pemerintahan melalui jalur budaya, pendidikan, dan politik. Upaya-upaya tersebut dilakukan sejak periode gerakan etnisitas awal dan periode gerakan etnisitas baru hingga masa

---

<sup>70</sup> A. Malek *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, Hlm 319.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad, Sabree dan Abdullah diantaranya keluarga dari gerakan etnisitas Kemelayuan Patani, di ban Jelor pada 29 September 2018 - 28 Juni 2019.

sekarang dengan melakukan resistansi dan reinternalisasi kemelayuan dengan bentuk *sosial society* demi mencegah pemahaman lintas budaya Siam yang masuk pada kalangan anak-anak dan remaja.

Salah satu hal yang ditakutkan dan menjadi rintangan terbesar di tengah masyarakat Melayu Patani adalah masyarakat Melayu Patani saat ini tidak dapat menulis dan berbicara dengan bahasa *Rumi* (Melayu) semestinya, seperti bahasa Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya kontaminasi lintas budaya Siam dalam bidang bahasa.<sup>72</sup>

Dikhawatirkan anak-anak Patani mudah menerima pemahaman dari kebijakan pemerintah sehingga masyarakat Patani berupaya melakukan reinternalisasi dengan beberapa cara, di antaranya:

- 1) Mengsosialisasikan kebudayaan Melayu yang merupakan kebudayaan lokal masyarakat Patani;
- 2) Mengsosialisasikan baju kebudayaan, seperti baju Melayu pada kalangan pemuda dan pemudi.
- 3) Mengsolisasikan sejarah Melayu pada pemuda dan pemudi. Sejauh ini masyarakat Patani tidak mengetahui sejarah leluhur mereka disebabkan buku-buku yang berbau sejarah terdahulu di bakar habis untuk menghilangkan jejak sejarah di wilayah tersebut.

Secara garis besar, lembaga reinternalisasi kemelayuan di Patani dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

#### 1. Surau (Masjid)

Keberadaan masjid di tiga wilayah Patani bukan hanya berperan sebagai tempat ibadah saja, melainkan juga berperan sebagai lembaga pendidikan. Peran Masjid sejak dari dulu telah memberikan kontribusi dengan mempersatukan masyarakat Patani. Masjid juga dijadikan sebagai tempat beraktivitas mencari ilmu

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara Hasan dan Ahmad di Penarek, Patani pada 21 Agustus' 2018.

agama Islam yang disalurkan melalui pengajian di level masyarakat desa. Aktivitas yang kerap dilakukan di masjid di antaranya, yaitu belajar Alquran, pengajian kitab kuning, dan pembacaan barzanji.

Selain itu, masjid juga berperan sebagai tempat pembentukan karakter masyarakat Patani di bidang politik dan sosial yang dibangun oleh pemuka agama yang ada di kawasan tiga wilayah tersebut. Tidak heran jika elite-elite *surau* sering menjadi sasaran kekerasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti penembakan masjid yang menewaskan masyarakat setempat ketika beribadah.

## 2. Pondok (Pesantren)

Pondok juga tidak kalah menariknya dengan masjid. Peran penting pondok adalah sebagai tempat mempertebal identitas kepatanian dan mempelajari ilmu-ilmu agama yang tidak mereka dapatkan di sekolah-sekolah kerajaan. Hal ini menyebabkan pengaruh pondok sangat kuat dikalangan masyarakat Patani.

Di samping itu, peran pondok ikut terseret dalam hal gerakan etnisitas yang pernah dilakukan mendiang pendiri BRN yang berasal dari kalangan tokoh agama Pondok. Tidak heran jika pondok salah satu sasaran yang sering menjadi target sabotase, penembakan, penculikan *tok guru* atau senior dan santri. Ideologi kalangan pondok yang fanatik dan juga memiliki ideologi jihad membuat mereka selalu dibayang-bayangi oleh *Tahang*, seperti penangkapan santri yang dicurigai sebagai golongan pemberontak pemerintahan Siam.<sup>73</sup>

## 3. Tadika

Tadika merupakan salah satu lembaga pendidikan masyarakat Patani yang telah berdiri 100 tahun lebih. Tadika berada di bawah pengawasan masjid yang dibangun oleh

---

<sup>73</sup> Hasil observasi Penulis dan wawancara dengan Sabree Tahee Pada 31 Juni 2019.

masyarakat kampung di tiga wilayah Patani, yakni Yala, Narathiwat, dan Songkhala.

Peran Tadika adalah untuk memperkenalkan identitas Melayu terutama bahasa *Rumi* (Melayu) dan Jawi pada anak-anak usia 3 sampai dengan 15 tahun. Kegiatan pendidikan dilaksanakan pada hari libur sekolah kerajaan, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.25. Selain memperkenalkan huruf *Rumi* dan Jawi, silat dan barzanji juga termasuk dalam materi pembelajaran (muatan lokal). Ilmu agama juga diajarkan karena anak-anak Melayu wajib bersekolah di sekolah Kerajaan Siam yang tidak mengajarkan bahasa Melayu dan tidak mengajarkan pelajaran agama.

Bagi masyarakat Patani menjadi muslim tidaklah cukup, tetapi syarat kesempurnaannya sebagai muslim adalah menjadi Melayu.<sup>74</sup> Hal inilah yang membentuk identitas sekaligus karakter etnisitas muslim di wilayah Patani yang membedakan dengan etnis muslim lainnya di wilayah Thailand.

Guru-guru di tadika didatangkan dari kalangan pondok dan masyarakat setempat yang dipercayai. Pembelajaran yang mereka ajarkan pada anak-anak di antaranya bahasa Melayu atau *Rumi*, bahasa Jawi Melayu dalam bentuk tulisan, sejarah Nabi Muhammad saw. dan juga ilmu agama, seperti fiqih dan Alquran. Sedangkan pada kalangan anak-anak TK atau *anuban* memperkenalkan huruf Romawi (a, b, c dst).

Menurut salah satu guru pondok dan masyarakat Patani, Bahasa *Rumi* (Melayu) dan tulisan Jawi (Arab-Melayu) merupakan serangkaian dari identitas muslim Melayu Patani yang mendapat perhatian besar dari masyarakat Patani. Sebab, bahasa merupakan

---

<sup>74</sup>Ali Sodiqin, “‘Budaya Muslim Patani (Intergrasi, Konflik, dan Dinamikanya)’ Vol.14,No.1, Januari-Juli 2016 (1 Juni 2016): Yusuf,Imtiyaz .2009”Dalam *Ethoerigious and Political Dimensions of The Southern Thailand Conflict.*” Vol.14,No.1, Januari-Juli 2016 (1 Juni 2016): 34.

salah satu identitas diri masyarakat tertentu terutamanya Masyarakat Patani.<sup>75</sup>

Tadika merupakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai dasar yang kuat dan jelas. Adanya suatu tujuan yang jelas akan melahirkan hasil-hasil sesuai dengan yang diinginkan yang dapat berguna untuk mempertahankan identitas masyarakat Patani sekaligus Agama. Secara umum, tadika memiliki tujuan sebagai berikut.

- 1) Mendidik masyarakat, khususnya anak-anak sekaligus para remaja untuk menjadi seorang muslim yang memiliki budi pekerti dan juga mengenal jati diri mereka sebagai bangsa Melayu.
- 2) Mendidik sekaligus mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan karakter yang dapat membangun diri sendiri dan juga komunitas mereka untuk kebangkitan bangsa Melayu.
- 3) Menumbuhkan rasa cinta pada diri anak-anak Melayu terhadap bangsa Melayu.

Tadika merupakan lembaga pendidikan pada level desa. Lembaga pendidikan kemelayuan seperti inilah yang sangat berarti untuk mengajarkan nilai-nilai budaya Melayu dan nilai-nilai Islam, bahkan mencetak masyarakat yang berpaham Melayu untuk menjaga identitas diri mereka yang telah diasimilasikan dan diakulturasikan dalam lingkungan pendidikan Siam. Keberadaan Tadika berperan untuk menghambat ideologi yang masuk pada anak-anak sekaligus remaja.

## **H. Gerakan Reinternalisasi secara Internasional**

### **1. Lembaga ACSTF (*Acehnese Civil Society Task Force*)**

Lembaga internasional turut ikut serta dalam melakukan kegiatan reinternalisasi. Salah satunya, yaitu ACSTF (*Acehnese*

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Suwaibah, guru Melayu pada 18 Juli 2019.

*Civil Society Task Force*) yang memiliki pengaruh dalam upaya reinternalisasi kemelayuan di tiga wilayah Patani yang dipimpin oleh direktur ACSTF, Otto Nur Abdullah, dan Sekretaris Jenderal, Djuanda Jamal. Lembaga ini dibentuk pada 5 Oktober 2001 di Washington DC. Reinternalisasi yang ditawarkan dari peran lembaga internasional di antaranya adalah salah satunya memotivasi anak-anak korban konflik diantaranya dalam bidang bahasa, identitas diri, dan ilmu perdamaian.<sup>76</sup> Upaya ini membantu perdamaian dan menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat yang berbeda agama dan budaya.

Menurut Hasan, Patani dan Aceh memiliki kesamaan dari segi karakteristik sosial masyarakat, baik itu dalam hal budaya maupun rentetan konflik gerilya di masa dulu. Hal tersebut yang membuat Aceh mudah diterima dan dikenal di kalangan masyarakat Patani dalam upaya-upaya yang disalurkan oleh lembaga ACSTF yang meringankan mereka dalam reinternalisasi budaya juga membantu mereka mencontoh perilaku kehidupan masyarakat Aceh.<sup>77</sup>

## **I. Negosiasi Dan Kontestasi Di Patani**

Setelah Patani ditaklukan oleh Kerajaan Thailand pada tahun 1785 M, Kerajaan Thailand menggunakan politik kolonial dengan nama *Divide and Rule* pada tahun 1815 M. Patani Raya dibagi menjadi tujuh wilayah, di antaranya Nongchik, Jambu, Yala, Teluban, Legeh (Range), Raman, dan Patani. Pada tahun 1916 M, pembagian tersebut diubah menjadi empat wilayah saja, yaitu Patani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla hingga sekarang.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Samsidar, Harnanda, dan Rahmani, salah satu Relawan yang berasal dari Aceh. Di Narathiwath, Patani dan Songkhala 12 Oktober 2018.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Hasan dan Rusdy, Wawancara dengan pengurus Bunga Raya Group, Di Patani, 20 September 2018. pengurus Bunga Raya Group, di Penarek, Patani, 21 Agustus 2018.

<sup>78</sup> Nik Mahmud, *Sejarah perjuangan Melayu Patani, 1785-1954*, Hlm 32.

Pemerintah Thailand memberikan status sebagai wilayah yang mendapatkan otonomi di bawah pengawasan Pemerintah Siam (Thailand) pada tahun 1902-1938. Dekrit kerajaan tersebut berbunyi:

“Memberikan kebebasan bagi masyarakat Melayu Patani melaksanakan kegiatan sesuai dengan keyakinan dan budaya, raja Chulalongkorn mengadakan musyawarah dan menyetujui untuk tidak mengikuti urusan di bidang hukum keluarga dan hukum warisan yang bersifat sensitif, yang melibatkan khusus hukum Islam (Pasal XXXII)”.<sup>79</sup>

### 1. Otonomi Hukum Islam

Upaya untuk menggiring kaum ulama ke dalam birokrasi Negara Gajah Putih dilakukan dengan banyak cara dan cara tersebut tergantung pada suasana politik. Ketika terjadinya reformasi konstitusional pada tahun 1932, otoritas pusat memperbaharui upaya untuk menyeragamkan dan mengontrol praktik-praktik hukum dikalangan kaum muslim Melayu Patani.<sup>80</sup>

Dalam kasus kaum Muslim Melayu Patani, memperketat kontrol pemerintah pusat akan bertentangan dengan upaya untuk melakukan kebebasan dan persamaan dalam politik dan pengadilan. Sebuah daerah yang memiliki karakteristik-karakteristik sosial yang sama dengan bagian lainnya dari negeri itu dan mengharapkan hasil yang sama. Jalan keluarnya bagi pemerintah pusat adalah mengukuhkan “otonomi hukum” bagi daerah Thailand Selatan (Patani) tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh raja terdahulu Chulalongkorn dan penerusnya Wachiravut.

Ketika terjadinya revolusi konstitusi pada tahun 1932, pemerintah memperbarui upaya untuk menyeragamkan praktik-praktik hukum di kalangan muslim Melayu Patani. Karena raja menganggap belum ada ketertiban dalam *sala tok kali* yang cocok untuk waktu sekarang dan mengingat raja menghendaki agar rakyat

---

<sup>79</sup> Pitsuwan, *Islam and Malay Nationalism; A Case Study of The Malay Muslims Of Southern Thailand*.Hlm 93.

<sup>80</sup> Pitsuwan, *Islam and Malay Nationalism; A Case Study of The Malay Muslims Of Southern Thailand* .Hlm 103–104.

yang menganut agama Islam memperoleh keadilan dan fasilitas dalam urusan-urusan peradilan mereka yang menyangkut soal-soal perkawinan dan warisan yang dianggap berkaitan dengan agama mereka, maka raja memerintahkan agar ditetapkan prosedur yang berhubungan dengan pengadilan Islam seperti berikut ini:<sup>81</sup>

- 1) Tiap gubernur (di provinsi-provinsi Melayu) harus memiliki *tok haji* (haji) yang memiliki pengetahuan tentang Alquran dan dihormati oleh rakyat di provinsi yang bersangkutan, dan mengangkatnya menjadi *Tok Kali* (Kadi). *Tok kali* adalah gelar bagi orang yang paham ilmu agama dan hukum Islam. Mereka membahas kasus-kasus perdata yang menyangkut hukum Islam, yakni kasus-kasus yang menyangkut warisan dan perkawinan.
- 2) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara sesama kadi, harus memilih seorang *tok kali* sebagai ketua persidangan dan pendapat mayoritas akan menjadi putusan final. Sumpah saksi oleh para qadi sesuai dengan hukum Islam dengan UU Pembuktian tahun 1895.
- 3) Setelah para kadi itu selesai bermusyawarah dan memberikan putusan, hakim-hakim pada pengadilan biasa di daerah yang bersangkutan akan mengukuhkan putusan dari *tok kali* itu. Mengenai kompensasi bagi pihak-pihak yang bersengketa atau denda atau biaya yang harus dibayar, *tok kali* akan menetapkan sesuai dengan hukum Islam atau apa yang lazim menurut adat.
- 4) Hakim-hakim Thailand menjatuhkan putusan final sesuai dengan pendapat *tok kali*. Apabila keputusan final sidang menyimpang dari putusan *tok kali*, penggugat atau tergugat boleh mengajukan banding di mahkamah hukum. (Surat dengan materai kerajaan, Kementerian Dalam Negeri, 7/1969. (10 Desember 1903).

---

<sup>81</sup> Pitsuwan, *Islam and Malay Natioblism; Acase Study of The Malay Muslims Of Southern Thailand* Hlm 96–97.

## 2. Kaum Ulama Patani

Satu hal lain yang mendapat perhatian utama adalah dalam program *Chularajomtontri* atau Syaikh Al-Islam. Peneliti menyamakannya dengan MUI yang ada di Indonesia agar lebih mudah dipahami. *Chularajomtontri* didirikan sejak pertengahan 1960-an sebagai suatu upaya untuk mempererat hubungan antara komite pusat Islam Thailand dan kaum ulama setempat, termasuk majelis-majelis agama Islam tingkat provinsi di daerah perbatasan selatan.

Otoritas baru yang bernama Khuang Aphaiwong sebagai Perdana Menteri menggagas *Islamic Patronage Act* untuk mengembalikan tradisi Islam di selatan sebagai upaya mengurangi resistansi Muslim Melayu Patani akibat kebijakan Phibul sebelumnya. Khung juga menggagas berdirinya *Office for Islamic Affairs* atau Kantor Urusan Islam yang juga memiliki kantor pusat yang berlokasi di Bangkok untuk melayani kebutuhan umat Islam di seluruh Thailand. Berkat kebijakan tersebut, resistansi Melayu Patani berkurang. Khung juga membuat kebijakan lain seperti libur sekolah pada hari Jumat dan menghidupkan kembali pengadilan agama meskipun tidak berdiri seperti sebelumnya, tetapi menjadi bagian dari pengadilan umum agama.<sup>82</sup>

Khung juga menghapus larangan menggunakan simbol-simbol yang mengatasnamakan Melayu, seperti pemakaian peci, sarung, dan kerudung. Pemerintah juga mengembalikan posisi *Chularajomtontri*, seperti MUI di Bangkok dan mendudukkannya sebagai penasihat raja dalam masalah-masalah Islam. Jabatan ini tidak diisi sejak *Chularajomtontri* pada 1936 dan posisi itu selalu dijabat oleh seseorang hingga meninggal dunia.<sup>83</sup> Karena itu, disusunlah sebuah petisi yang disampaikan kepada Perdana Menteri dengan tujuh tuntutan sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Pitsuwan, *Islam and Malay Nationalism; A Case Study of The Malay Muslims Of Southern Thailand*, hlm 99.

<sup>83</sup> Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Jalan Damai dalam Thanet Aphornsuvan Oringin Of Malay Muslim "Separatism" in Southern Thailand* (Wahid Institute, 2012).

- 1) Penunjukan seorang pribumi yang memiliki kewenangan penuh untuk memerintah wilayah Patani.
- 2) Sebanyak 80% dari pegawai sipil yang bekerja di empat provinsi adalah muslim.
- 3) Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi negara (wilayah Patani) di samping bahasa Siam (Thailand).
- 4) Pengajaran di sekolah dasar harus menggunakan bahasa Melayu.
- 5) Hukum Islam harus dipakai dan diimplementasikan di peradilan agama, terpisah dari peradilan sipil.
- 6) Pajak dan pemasukan di empat provinsi harus digunakan untuk pembangunan daerah sendiri.
- 7) Mendirikan biro urusan muslim yang memiliki kewenangan penuh.

Dari beberapa tuntutan tersebut ada beberapa yang tidak disetujui, seperti pembatasan berlakunya hukum Islam serta kewenangan *Dato Yuthithams* terhadap penghapusan peradilan Islam karena disatukan dengan peradilan sipil dan pemberlakuan hukum sipil Thai di Patani. Sulong kemudian dipanggil oleh ketua kepolisian untuk datang ke Songkhla. Namun, pada 14 Desember 1954, Menteri Dalam Negeri Siam-Thai mengumumkan pada publik bahwa Sulong telah melarikan diri bersama pengikutnya.<sup>84</sup> Hingga kini tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya.<sup>85</sup>

Dari tujuh tuntutan tersebut, tidak ada satu pun tuntutan untuk merdeka atau memisahkan diri karena tampaknya mereka masih berharap akan ada negosiasi yang memungkinkan mereka mencapai kompromi di tiga provinsi tersebut. Pada saat itu pemerintah pusat membuka dialog otonomi. Mereka menuntut pemilihan gubernur secara langsung sebab calon gubernur lebih sering berasal dari komunitas Buddha dan tidak mengerti bahasa

---

<sup>84</sup> K.Zaman, "13 Ogos,"Hlm 19.

<sup>85</sup> K.Zaman, 13 Ogos,"Hlm 20.

pribumi orang-orang Melayu di tiga provinsi tersebut dan memandang rendah terhadap penduduk Muslim Melayu.

Secara kultural, posisi mereka yang minoritas di tengah bangsa mayoritas yang bukan saja berlainan agama, melainkan juga etnis dan bahasa, menambah akumulasi problem identitas politik mereka. Secara etnis dan bahasa, daerah tersebut adalah bagian dari etnis Melayu yang serumpun dengan muslim di Singapura, Malaysia, dan Sumatra. Ini berbeda dengan penduduk mayoritas di negara tersebut.<sup>86</sup>

Sementara itu, mengenai agama yang bisa menjadi faktor utama dalam membangun dan memperkuat identitas politik dan kultural, Scott Appleby menunjukkan dua dimensi dari agama. Pertama, agama bisa menjadi faktor dalam konflik dan kekerasan. Kedua, agama juga bisa menjadi faktor bagi transformasi konflik dan kekerasan menjadi perdamaian dan rekonsiliasi.<sup>87</sup>

Appleby mengatakan bahwa perbedaan pendapat tersebut terus terjaga di kalangan pemikiran dan tokoh-tokoh pemikiran dalam agama itu sendiri sehingga melahirkan ide-ide peran agama untuk menjadi faktor transformasi akan terus hidup. Selain itu, gerakan agama di berbagai wilayah pada kenyataannya bukan hanya diinisiasi oleh kalangan pemimpin agama, melainkan juga masuk ke dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan gerakan hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan, dan hak-hak budaya lokal di dalam kelompok agama itu sendiri. Pada saat itulah agama akan menjadi faktor dalam membangun perdamaian dan rekonsiliasi.<sup>88</sup>

Pemberian terhadap masyarakat Melayu Patani di antaranya adalah pemberian izin dua hari pembelajaran Melayu yang bersifat reinternalisasi dengan durasi hanya satu jam dalam waktu yang

---

<sup>86</sup> Hussain Mutalib, *Islam dan Etnisitas Perspektif Melayu* (Jakarta: LP3ES, 1995), Hlm 48–53.

<sup>87</sup> R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred, Religion, Violence and Reconciliation* (New York: Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2000), Hlm 281–307.

<sup>88</sup> Appleby, Hlm 281–307.

telah ditetapkan. Selain itu, *Tahang* (tentara) Siam tidak segan-segan mengecek kondisi dan situasi dan mengontrol materi yang diajarkan oleh guru-guru Melayu. Hal yang ditakutkan oleh Siam adalah guru-guru memberikan pemahaman nasionalisme Patani, seperti sejarah Melayu Patani.

Selain itu, juga ada pemberian izin bagi Tadika selama dua hari untuk mempelajari identitas Melayu. Dulunya hanya diberikan waktu satu hari, yaitu pada hari Sabtu saja. Saat ini telah ditambah menjadi dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Selain itu, gaji atau upah selama mendidik anak-anak muslim Melayu Patani ditanggung oleh Pemerintahan Siam (Thailand). Pembangunan tadika ini dari hasil masyarakat Patani yang merupakan orang-orang kampung<sup>89</sup>

Pemberian itu semata-mata untuk menyenangkan hati masyarakat Patani, namun dari sisi lain sebenarnya *Tahang* (tentara) Siam memiliki tujuan tersendiri, yakni untuk mengontrol pergerakan apa saja yang diajarkan di tadika dan melakukan pengambilan paksa guru-guru yang dianggap bertentangan dengan ideologi nasional Siam (Thailand). Guru-guru Melayu diharuskan mengikuti agenda-agenda yang diselenggarakan oleh *Tahang* (tentara), termasuk acara kultural yang berbau Siam. Namun, para guru Melayu yang melakukan reinternalisasi tidak berkenan mengikuti agenda-agenda yang diselenggarakan tersebut. Jika mereka tidak datang, akan mendapatkan teguran dari pihak *Tahang* terhadap kebijakan terhadap masyarakat Patani yang diberikan oleh pemerintahan Siam.

Pemerintah Thailand memberikan otonomi Hukum kepada masyarakat muslim Melayu Patani untuk memperoleh keadilan dan fasilitas dalam urusan-urusan peradilan mereka yang penyangkut tentang Perkahwinan dan warisan yang dianggap berkaitan dengan agama Islam. Selain itu, Siam juga memberikan negosiasi dalam hal kepemimpinan, namun tidak diberikan jabatan

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Ustad Rozi, Wawancara dengan pengurus Tadika di ban Hutan Jelor pada 18 Juli 2019.

tunggal. Hanya boleh sebagai wakil, misalnya wakil gubernur, dan sebagai camat atau kepala desa.

Hal tersebut diberikan pemerintahan Thailand sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang ada di tiga wilayah Thailand sejak tahun 2004. Hingga saat ini, pemerintahan Thailand membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat muslim Melayu Patani, seperti menjadi pejabat pemerintahan di wilayah Patani dan wilayah lainnya. Sudah terdapat orang-orang melayu Patani yang menjadi kepala sekolah dan guru, bahkan menjadi kepala negara (wakil gebernur dan anggota dewan).<sup>90</sup>

Di antara upaya pemerintah Thailand dalam kegiatan negosiasi adalah sebagai berikut:

- 1) Sekolah (tadika) yang didirikan oleh masyarakat Patani telah digaji oleh pemerintahan Thailand.
- 2) Setiap masjid mendapatkan biaya dari pemerintah. Biaya tersebut diberikan pada pengurus masjid sebagai gaji bulanan mereka di antaranya yang mendapatkan, *tok imea* 'imam masjid', khatib, bilal, dan anggota lainnya.
- 3) Pemerintah Thailand juga memberikan bantuan berupa kebutuhan dapur dan pemberian uang setiap bulan untuk masyarakat kurang mampu
- 4) Pemerintah juga mengizinkan pendirian bank Islam di tiga wilayah, yaitu di Patani, Yala, Narathiwath.
- 5) Pemerintah juga membagikan tanah untuk sektor pertanian.

## **J. Upaya Rekonsiliasi Di Patani**

### **1. Membuka Dialog dengan Thailand (2005)**

Puncak kekerasan di Thailand Selatan yang terjadi pada tahun 2004 ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu serangan terhadap Masjid Krue Se pada 28 April 2004 dan dilanjutkan

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Akak Yah, nurinee dan Beeha guru tadika di Ban Klorek dan jelor Satun, 17 Juli 2019.

dengan insiden kekerasan di Tak Bai pada 25 Oktober 2004. Konflik itu telah menelan korban jiwa sekitar 1.300 jiwa. Peristiwa ini menimbulkan kontroversi besar dan mulai memunculkan spekulasi berupa tuduhan kekerasan yang berlebihan sehingga menarik perhatian dunia internasional.

Salah satu organisasi internasional yang menaruh perhatian besar terhadap konflik tersebut adalah Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Suatu siaran pers mengutuk berlanjutnya aksi kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan menyuarakan negosiasi dan dialog damai untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh Muslim Melayu Patani. OKI juga menyuarakan kepada pemerintahan Thailand agar memperlakukan masyarakat Muslim di Patani setara dengan warga negara yang lainnya.<sup>91</sup>

Delegasi Thailand menjelaskan fakta-fakta seputar munculnya kekerasan yang ada di wilayah Patani. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam memulihkan kestabilan di wilayah Patani terkait dengan konflik kekerasan yang terjadi di Krue Se dan Tak Bai adalah membentuk tim pencari fakta yang sedang mencari kebenaran atas terjadinya dua insiden tersebut, kemudian pemerintah melakukan berbagai langkah perbaikan.

Langkah perbaikan yang diambil pemerintah adalah tindakan disiplin bagi yang terlibat dalam konflik kekerasan tersebut dan memberikan kompensasi kepada korban. Selain itu, delegasi juga menjelaskan bahwa ada tekad kuat dari pemerintahan Thailand untuk mempromosikan perdamaian dan keharmonisan di wilayah Patani dengan mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, serta proyek infrastruktur yang dilakukan dengan

---

<sup>91</sup> Imtiyaz Yusuf, *The Southern Thailand Conflict And the Muslim World* (Peper: Assumption University, 2006).

strategi pembangunan bersama Malaysia yang bertujuan membangkitkan semangat masyarakat wilayah Patani.<sup>92</sup>

Pada tahun 2005 pihak Thailand mengundang OKI. Pada titik inilah secara resmi OKI dapat dikatakan menjadi orang ketiga yang melakukan intervensi guna mencapai resolusi konflik di Patani. Kunjungan OKI ke Patani ditentukan untuk meninjau secara langsung kondisi yang dialami oleh masyarakat muslim Melayu Patani. Delegasi OKI diizinkan menggunakan kantor pemerintahan yang berada di Patani. Selain lebih dekat dengan lokasi dimana kekerasan terjadi, penempatan kantor sementara delegasi OKI ini juga berguna untuk meninjau dan merendahkan hambatan yang mungkin terjadi untuk mewujudkan negosiasi yang memungkinkan bagi muslim Melayu Patani untuk menikmati hak-haknya sebagai warga negara.

Pemimpin delegasi, Al Masri, menegaskan akan mengambil tindakan yang diberlakukan agar pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dapat dihukum dan korban mendapatkan kompensasi. Pemimpinan delegasi juga menegaskan bahwa kehadiran mereka untuk mencegah terulangnya pelanggaran atau aksi kekerasan di Thailand terhadap etnis muslim Melayu Patani. Masri menegaskan bahwa pemerintahan Thailand harus mengizinkan masyarakat Patani untuk mengembangkan budaya dan bahasa mereka<sup>93</sup>

Tanggapan positif diberikan oleh pemerintahan Thailand dan mereka menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh Perdana Menteri Thailand, Surayud Chulanod, untuk mencapai tujuan damai dan adil untuk permasalahan Patani dengan negosiasi. Perdana Menteri Thailand meminta maaf kepada masyarakat muslim Melayu Patani atas kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang banyak menelan korban. Perdana menteri juga menyelidiki orang hilang sejak demonstrasi pada tahun 2004. Selain itu, perdana menteri bersedia melakukan

---

<sup>92</sup> Z. Abidin, *The Organization of the Islamic Conference, Meeting between Secretary General of OIC and High-Level Thai Delegation on the Situation in the Southern Province of Thailand*.

<sup>93</sup> Yusuf, *The Southern Thailand Conflict And the Muslim World*, Hlm 45.

investigasi dalam memecahkan masalah atas dasar negosiasi dan melakukan pemulihan dewan Administrasi Provinsi Patani.<sup>94</sup>

## 2. Membuka Dialog dengan Gerakan Etnisitas Kemelayuan Patani (2009)

OKI tidak hanya berusaha bersikap kooperatif dengan pemerintahan Thailand guna mencari solusi untuk Patani, tetapi OKI juga berupaya mengikutsertakan kelompok gerakan etnisitas kemelayuan dalam proses perdamaian pada tahun 2009. Pertemuan OKI dengan kelompok etnisitas kemelayuan Patani dimulai dari PULO. Pihak PULO, Al Haj Abu Yasir Fikri, diundang ke sekretariat di Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 18-19 April 2009.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan PULO menyebutkan bahwa untuk memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi di Patani, semua pihak harus melihat akar permasalahan yang lebih mendalam. Thailand melihat wilayah Patani sebagai wilayahnya, namun gerakan-gerakan etnisitas Patani melihat Thailand sebagai kolonial yang menduduki wilayah mereka dengan paksa. Untuk memahami kasus Thailand ini, perwakilan memberikan empat poin penting untuk dipahami, yaitu:<sup>95</sup>

- 1) Konflik antara gerakan etnisitas Patani untuk kemerdekaan Patani dan pemerintah Thailand adalah tentang mempertahankan wilayah Patani.
- 2) Akar konflik di wilayah tersebut berasal dari keputusan pemerintah Thailand untuk menghapuskan Kesultanan Melayu Patani pada tahun 1902.
- 3) Bahasa, adat istiadat, dan budaya mayoritas masyarakat di Patani berbeda dengan mayoritas Thailand di daerah Patani. Sekitar 90% dari populasi masyarakat adalah

---

<sup>94</sup>Z. Abidin, *The Organization of the Islamic Conference, Meeting between Secretary General of OIC and High-Level Thai Delegation on the Situation in the Southern Province of Thailand*.

<sup>95</sup>Pattani Post, "PULO president invite to speak at OIC meeting," 19 April 2009 (online) <http://web.archive.org/web/20130530040803/http://www.patanipost.com/OIC090419.html>, diakses tanggal 8 Agustus 2019

muslim melayu dengan masyarakat Siam-Budha sebagai minoritas.

- 4) Tidak adanya pengakuan keberadaan etnis Melayu dan menolak identitas mereka sehingga menimbulkan hambatan yang besar untuk hidup berdampingan secara damai.

### 3. Membuka Dialog dengan *civil society*

Delegasi yang diundang sebagai perwakilan Patani di PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) membahas isu budaya dan pendidikan bagi masyarakat minoritas. Mereka membahas masalah asimilasi jangka panjang oleh pemerintahan Thailand, misalnya dengan mengubah nama tempat menjadi bahasa Thailand, adaptasi kata-kata Thailand, tata bahasa yang salah, dan kurangnya literasi tertulis.<sup>96</sup>

Thailand tidak memiliki kebijakan apa pun untuk merepresentasikan dan melindungi identitas dan bahasa Melayu. Otoritas pusat lebih merepresentasikan kebudayaan Thailand dan mencoba ikut campur tangan dalam kurikulum sekolah, serta mencoba untuk memaksakan ejaan melayu ke bahasa Thailand.

Ada beberapa hal yang ditawarkan oleh delegasi Patani terhadap pemerintah Thailand, yaitu sebagai berikut.

- 1) Thailand harus menghilangkan asimilasi etnis terutama melalui kurikulum sekolah Melayu.
- 2) Sekolah tidak boleh dijadikan tempat operasi militer.
- 3) Sekolah melayu tadika dan pondok pesantren harus bebas mengembangkan bahasa leluhur, yaitu bahasa Melayu tanpa tuduhan yang tidak didasari bukti.

---

<sup>96</sup> “Dokument Pribadi Hasan Yamadibu dialog di Geneva PBB,” 28 November 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu sebagai berikut.

Konflik antara Muslim Melayu Patani dengan pemerintahan Siam dimulai sejak perjanjian Anglo-Siames, yakni perjanjian mengenai perbatasan wilayah kekuasaan antara pemerintahan kolonial Inggris dan Siam-Thailand. Selain itu, konflik juga disebabkan oleh adanya pengabaian terhadap kultural budaya leluhur masyarakat Muslim Melayu Patani yang berbeda dua lintas budaya, yaitu budaya dari komunitas etnis Melayu-Islam dan Siam-Buddha.

Proses reinternalisasi identitas Muslim Melayu Patani di Thailand Selatan dilakukan dengan menanamkan kembali identitas leluhur, seperti bahasa *Rumi* (bahasa Melayu), menumbuhkan dan mengembangkan kembali budaya yang identik dengan Melayu. Di samping itu, cara lainnya mendatangkan lembaga-lembaga ACSTF (*Acehness Civil Society Task Force*) dari luar di antaranya yang berasal dari Aceh yang memiliki karakter dan sifat yang sama dengan masyarakat Patani.

Upaya kontestasi dan negosiasi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik identitas Muslim Melayu Patani di Thailand Selatan adalah dengan cara melakukan dialog yang difasilitasi oleh lembaga OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan juga PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa atau dikenal dengan nama lain *Unitions Nation*).

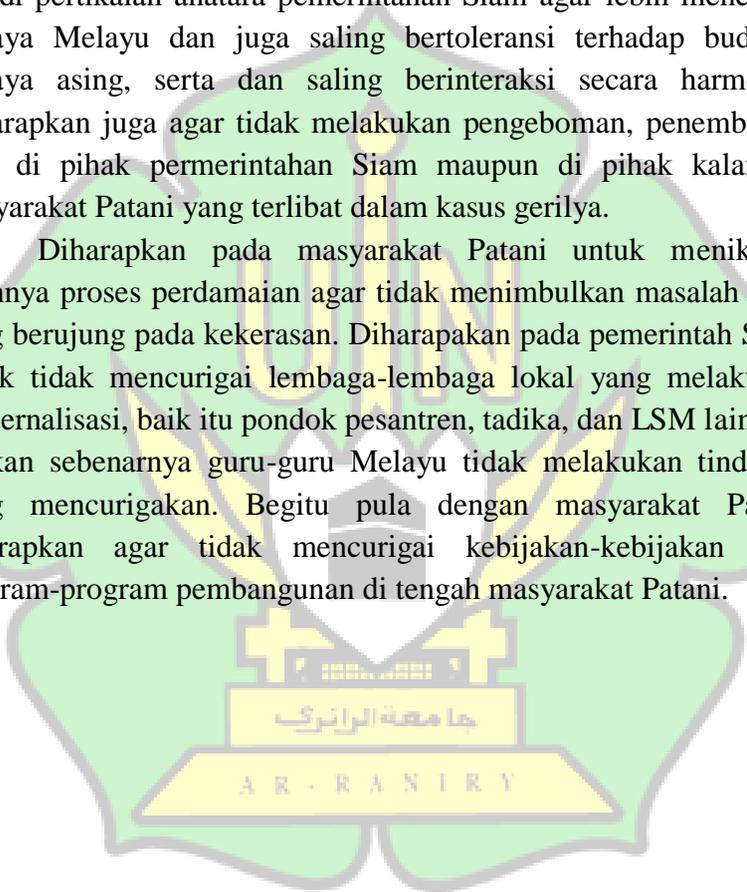
Beberapa resolusi yang ditawarkan oleh pemerintahan Siam (*affirmative action*) di antaranya adalah pemberian otonomi hukum Islam, seperti *Chalarajmontri* dan pendirian sekolah agama Islam walaupun masih belum ada payung hukum yang jelas.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengemukakan beberapa saran agar dapat dipertimbangkan dan diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

Diharapkan kepada masyarakat Patani pada umumnya yang ada di Thailand Selatan, terutama di tiga wilayah yang masih terjadi pertikaian antara pemerintahan Siam agar lebih mencintai budaya Melayu dan juga saling bertoleransi terhadap budaya-budaya asing, serta dan saling berinteraksi secara harmonis. Diharapkan juga agar tidak melakukan pengeboman, penembakan baik di pihak pemerintahan Siam maupun di pihak kalangan masyarakat Patani yang terlibat dalam kasus gerilya.

Diharapkan pada masyarakat Patani untuk menikmati jalannya proses perdamaian agar tidak menimbulkan masalah baru yang berujung pada kekerasan. Diharapkan pada pemerintah Siam untuk tidak mencurigai lembaga-lembaga lokal yang melakukan reinternalisasi, baik itu pondok pesantren, tadika, dan LSM lainnya, bahkan sebenarnya guru-guru Melayu tidak melakukan tindakan yang mencurigakan. Begitu pula dengan masyarakat Patani diharapkan agar tidak mencurigai kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan di tengah masyarakat Patani.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Malek, Mohd Zamberi. *Harimau Malaya: Biografi Tengku Mahmood Mahyiddeen*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, 1999.
- Ahmad, Suaedy. *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai'' Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*. Center for Islam and Southeast Asia Studies The WAHID Institute (CISEAS-WI). Jakarta: Puslitbtur dan Khazanah Keagamaan badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan CISEAS-THE WAHID Institute, 2012.
- Coser, Lewis. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- “Dokument Pribadi Hasan Yamadibu dialog di Geneva PBB,” 28 November 2019.
- Haji Salleh, Siti Hawa. *Hikayat Patani*. Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 2010.
- Hasil observasi dan wawancara dengan akak Yah istri Imam Masjid. Ban Hutan Jelor pada 29 November 2018., 29 November 2018.
- Irving M, Zeitlin. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Kurniawan, Deni. *Kamus Istilah Politik Dan Kewarganegaraan*. Bandung: Yramawidia, 2006.
- K.Zaman, Muhammad Kamal. “13 Ogos.” Unpublished, 1996.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur*. Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Malik, Maszlee. *Jalan Damaim Menuju Damai Di Patani Kronologi Perjuangan Muslim Di Patani Darussalam*. Pulau Pinang: Aman Patani, 2012.
- Miall, Hugh, dan Oliver Ramsbotham. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan Mencegah dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Morissan. *Teori Komunikasi - Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Nik Mahmud, Nik Anuar. *Sejarah perjuangan Melayu Patani, 1785-1954*. Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006.
- Nuereng, Mr. Ilham. “Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam,” *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 5, No.2, (Mei 2016).
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syukri, Ibrahim. *Sejarah Kerjaan Melayu Patani*. Cet 2. Selangor: Universiti Antar Kebangsaan Malaysia, 2005.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. 2 ed. Preada Media: Jakarta, 2005.
- Ting-Toomey, Stella. *Communicating Across Cultures*. New York: The Guilford Publications, 1999.
- Wirawan, I.B. *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi Dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Yurisa, Irawan. “Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Konflik Thailand Selatan.” PhD Thesis, Universitas Andalas, 2016.

#### **Jurnal:**

- Nuereng, Mr. Ilham. “Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam,” *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 5, No.2, (Mei 2016).
- Omar Din, Mohamed Anwar. “Asal-Usul Orang Melayu: Menulis SemulaSejarahnya,” 2011. <http://journalarticle.ukm.my/3186/1/1.pdf>.

#### **Skripsi/Tesis:**

- Yurisa, Irawan. “Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Konflik Thailand Selatan.” PhD Thesis, Universitas Andalas, 2016.

#### **Laporan dan Media:**

- BBC. “Thailand menyepakati perdamaian dengan pemberontak.” *BBC News Indonesia*, 28 Februari 2013.

[https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/130228\\_thailand\\_militan](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/130228_thailand_militan).

“Dokument Pribadi Hasan Yamadibu dialog di Geneva PBB,” 28 November 2019.



## GLOSARIUM

- ACSTF : *Acehness Civil Society Task Force* salah satu lembaga swadaya masyarakat Aceh yang memfokuskan dalam bidang perdamaian juga pendidikan.
- Asimilasi : Suatu kebijakan dari sebuah kekuasaan agar kelompok-kelompok minoritas menyesuaikan dengan kebijakan nasional atau identitas nasional satu bangsa.
- Anglo-Siamis : Salah satu perjanjian pembagian wilayah Thailand Selatan antara kolonial Inggris dan Siam-Thailand
- Bunga Raya Group : Lembaga swadaya masyarakat Thailand Selatan yang memfokuskan pada bidang pendidikan dan budaya
- Chularajmontri : Majelis Ulama Yang ada di Thailand di bentuk pada masa raja chulalokon
- Changwad : Provinsi dalam bahasa Thailand
- Qali : Hakim Islam, sedangkan orang Thai-Budha menyebutnya Qadi dengan sebutan kali.
- Tok Imea : Iman mesjid salah satu pembuka agama yang di hormati baik keban yang di keluarkan di kecamatan dan kampong
- Ratthaniyom : Undang- undang yang mengatur segala urusan dalam program Thaisasi (reformasi budaya) bagi Muslim yang ditetapkan pada masa Phibul Songkram.
- Separatisme : Suatu gerakan masyarakat yang mengklaim wilayah tertentu di dalam suatu negara dengan tujuan untuk

- memisahkan diri dari pemerintahan pusat.
- Siam : Siam nama sebelum di ubah menjadi nama negara Thailand yang berlaku sampai sekarang.
- Thesaphinan : Sistem administrasi daerah
- Tadika : Taman pendidikan kanak-kanak jika di indonesia sering disebutkan Diniyah yang dibawah pengawasan masjid di wilayah tersebut.
- BRN : Badan Barisan Naional atau dikenal dengan nama lain Liberation Front of Republic Patani, salah satu gerakan separati.
- Tahang : Tentara dalam bahasa Thailand







**SEKOLAH MELAYU BESTARI DARUSSALAM**  
**Kg.Hutan Jelor M.2-T.Baritai-A.Bacho-Ch.Narathiwat. Thailand.**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 01/SMBD/VII/2019.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini Mudir sekolah Melayu Bestari Darussalam Hutan Jelor Mukim Barittai wilayah Bachok, Provinsi Narathiwat menerangkan bahwa :

Nama : Raudhatur Rahmah  
NIM : 150305078  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filfasat UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh  
Semester : VIII (Genap)  
Jurusan : Sosiologi Agama

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi terhitung sejak tanggal 17-31 Juli 2019 untuk memenuhi kelengkapan data dalam penulisan Skripsi pada salah Satu Lembaga Tadika Hutan Jelor di kawasan Mukim Barittai wilayah Bacho, Provinsi Narathiwat yang bertujuan untuk penyelesaian tugas akhir perkuliahan dengan judul ” **Memelayukan Melayu kembali: Konflik dan Gerakan Etnisitas Di Patani, Thailand Selatan**”

Demikian surat keterangan ini di keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.





## SEKOLAH MELAYU BESTARI DARUSSALAM

Kg.Hutan Jelor M.2-T.Baritai-A.Bacho-Ch.Narathiwat. Thailand.

### หนังสือรับรอง

หมายเลข: 01/SMBD/VII/2019.

อัสตตามุลลัษกูมารอฮมาตุลลอฮฮิวาบรอกาตุส

ผู้ลงนามคือ มุคร์โรงเรียนตาดิกา Bestari Darussalam Hutan Jelor ต.บาระไต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ชื่อ : Raudhatur Rahmah

NIM : 150305078

อาชีพ : นักศึกษาคณะ Ushuluddin และปรัชญา Ar-Raniry ของ UIN Banda Aceh

ภาคการศึกษา: VIII (แบน)

หน่วยงาน: สังคมวิทยาศาสตร์

สิ่งที่ได้กล่าวมาได้ดำเนินการวิจัยเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2562

เพื่อดำเนินการวิจัยเพื่อส่งเสริมข้อมูลในการเขียนวิทยานิพนธ์ที่หนึ่งในตาดิกา Bestari Darussalam Huta Jelor ในพื้นที่ ต.บาระไต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เรื่องการกลับมาของความเป็นมาอยู่ในการจัดแข่งและ ขบวนการชาติพันธุ์ในปัตตานีภาคใต้ของประเทศไทย

หนังสือฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ



(นาย มะรอซี นานะ)

## DOKUMENTASI



Gambar 1.1

Membuat Dodol Pada Hari Sepuluh Muharam Di Ban Hutan Jelor Hari Jumat 28 Agustus 2018



Gambar 1.2

Pertemuan Dengan Militer Pada Hari Sepuluh Muharam di Ban klorek Tentang Kerukunan agama. Hari Rabu 11 September 2018.



Gambar 1.3

Memperingati Suka Cita Maulid di Ban (*desa*) hutan Jelor, di rumah Haifat Tehelong. Hari Senin 19 November 2018.



Gambar 1.4

Mushaf Alquran ditulis Tangan oleh Nuruddin Ar-raniry Pada Tahun 1636 M di Narathiwath. Di simpan di Musium Al-quran Lubok Sawoh. 29 September 2018



Gambar 2.1  
Makam Tok Pasai di Padang Bunga, Patani  
3 September 2018



Gambar 2.2  
*Ban* (desa) pupor Baku Tembak Antara Anggota  
Separatis Dan Aparat Militer Di Thailand  
1 Desember 2018



Gambar 2.3  
Kedatangan Tentara Dalam Rangka Pemothongan  
Rambut di Tadika Hutan Jelor di *Ban* (desa)  
Hutan Jelor, Bacho  
19 Agustus 2018



Gambar 2.4  
Tentara Melakukan Pembelajaran Siam Terhadap  
Anak-anak Melayu Di Narathiwat. *Ban* (desa)  
Hutan Jelor, Bacho  
21 Juni 2029



Gambar 3.1  
Kondisi Kedatangan Tentara Siam Di Tadika  
Hutan Jelaw tujuanya Mengecek Kondisi di  
Tadika Saat Proses Belajar.  
9 Agustus 2018



Gambar 1.1  
Atraksi Pencat Silat Gayo (Indah) Salah Satu  
Kebudayaan Masyarakat Patani.  
12 September 2018



## **PERTANYAAN WAWANCARA**

### **1. Bagaimana Sejarah terjadinya konflik antara Muslim Melayu Patani dengan Pemerintahan Siam(Thailand)?**

Pertanyaan kategori : Sejarah

1. Peninggalan keislaman apa saja yang masih ada di Patani?
2. Sejak kapan terjadinya konflik etnisitas di Patani?
3. Penyebab terjadinya konflik di Patani?
4. Faktor apa saja yang menjadinya pemicu konflik tersebut?
5. Bagaimana proses terjadinya perjanjian Anglo-Siamse?
6. Apa yang menyebabkan pembunuhan Haji Sulung ?
7. Berapa lama terjadinya pemberontakan Haji Sulung?
8. Apa upaya yang terjadi terhadap etnisitas Melayu Patani dengan tujuan pemberontakan?
9. Peristiwa apa saja yang terjadi pada tahun 2004 pada Krue Seek dan Takbai?
10. Apa penyebab terjadinya peristiwa krue seek dan Takbai?
11. Apa upaya terhadap etnisitas Melayu Patani setelah terjadinya peristiwa krue seek dan takbai?

### **2. Bagaimana Kontestasi dan Negosiasi penyelesaian konflik Identitas Muslim Melayu Patani di Thailand Selatan?**

Pertanyaan kategori: kontestasi

1. Apa pengaruh konflik patani terhadap etnis melayu patani?
2. Apa pengaruh konflik terhadap agama di patani?

3. Apa pengaruh konflik terhadap pendidikan di Patani?
4. Apa pengaruh konflik terhadap politik?
5. Bagaimana proses negosiasi pemerintahan Siam (Thailand) dalam menghadapi konflik Muslim Melayu Patani?
6. Upaya-upaya komunitas internasional dalam penyelesaian konflik?

Pertanyaan kategori Negosiasi

1. Apa saja negosiasi reinternalisasi antara Melayu Patani dan Siam sejak sekarang?
2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan kedua belah pihak?

### **3. Bagaimana upaya dan proses reinternalisasi identitas Muslim Melayu Patani di Thailand Selatan?**

Pertanyaan kategori: Reinternalisasi

1. Apa yang mendorong masyarakat Patani melakukan reinternalisasi identitas?
2. Sejak kapan reinternalisasi sudah dilakukan dan berkembang?
3. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada identitas Patani?
4. Upaya apa saja dalam melakukan reinternalisasi kemelayuaan di Patani?
5. Apa peran Aceh dalam upaya reinternalisasi ke Melayuaan?
6. Seberapa besar masyarakat Patani peduli terhadap budaya Melayu Patani?